

**SKRIPSI**

**KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DI KABUPATEN JENEPONTO**

**YANSAR**

**105610549715**



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

**KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN JENEPONTO**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Di Susun Dan Diajukan Oleh

**YANSAR**

Nomor Stambuk : 105610 5497 15

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan  
Penelitian dan Pengembangan Daerah  
(BAPPEDA) dalam Pelaksanaan Pembangunan  
Daerah di Kabupaten Jeneponto

Nama Mahasiswa : Yansar

Nomor Stambuk : 10561 05497 15

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Muhlis Madani, M.Si**



**Dr. Abdi, M.Pd**

Mengetahui:

Dekan

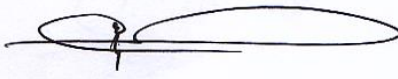
Ketua Program Studi

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Administrasi Negara



**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**



**Nasrulhaq, S.Sos., MPA**

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0055/FSP/A.4-II/IX/41/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Jum'at tanggal 27 bulan September tahun 2019.

### TIM PENILAI

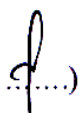
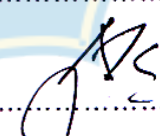
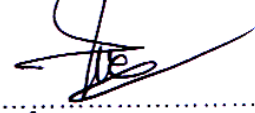
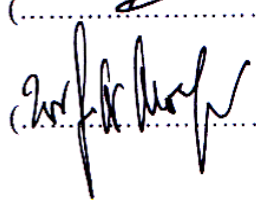
Ketua

Sekretaris

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

  
Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji:

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (Ketua) (..... )
2. Abd Kadir Adys, SH, MM (..... )
3. Dr. H. Muh Isa Ansyari, M.Si (..... )
4. Dr. Anwar Parawangi, M.Si (..... )



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang betanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : YANSAR

Nomor Stambuk : 10561 0549 715

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak dari lain atau telah ditulis/dipublikasikan ke orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 25 September 2019

Yang Menyatakan,

  
YANSAR

## ABSTRAK

**Yansar (2019), Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Jeneponto** (dibimbing oleh Muhlis Madani dan abdi).

Pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi, menuntut setiap organisasi mendapatkan pegawai yang mempunyai kompetensi, integritas, berkualitas, dan produktif untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jeneponto. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Jeneponto.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang yaitu Kepala Bidang Perencanaan Makro Evaluasi dan Pelaporan, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Kepala Kelurahan Sidenre, LSM Pattiro Jeka, Kepala Lingkungan Bosalia, Tokoh Masyarakat, Staf Kelurahan Sidenre, dan Masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Pengabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Jeneponto belum maksimal karena dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas kerja yang dimana terdapat pembangunan yang sampai saat ini belum terselesaikan seperti pembangunan jembatan yang ada di Lingkungan Bosalia dan pembangunan pabrik rumput laut yang belum beroperasi sampai saat ini. Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) berdasarkan pada kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto.

**Kata Kunci: Kinerja, Pelaksanaan, Pembangunan.**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat limpahan rahmat-Nya yang masih memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Jeneponto”**. Berbagai kendala yang dihadapi penulis dalam penyelesaian skripsi ini dijadikan sebagai proses pembelajaran dan pengalaman.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara materi maupun non materi. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Sabang dan Ibunda Rabatia tercinta yang telah mendidik, membesarkan, menyayangi dan senantiasa mendoakan dengan tulus untuk kebaikan penulis serta ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M. Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Abdi, M. Pd selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan mulai dari perumusan judul, penyusunan proposal sampai penyelesaian skripsi ini. Rasa terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberi pengaruh kepada penulis selama ini yaitu:

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE, MM

2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Bapak NasrulHaq, S.Sos, M.PA atas bimbingan yang telah diberikan selama ini
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan serta Staf Tata Usaha yang telah banyak membantu penulis
5. Bapak Dr. Abdi, M.Pd selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi untuk penyelesaian studi penulis
6. Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam hal ini Kepala Bappeda yang telah memberikan izin meneliti dan membantu dalam pengumpulan data untuk penyusunan skripsi
7. Untuk saudara-saudari tercinta Kak Sadariah, S.Kep dan kak Lukman atas bimbingan, semangat, motivasi, kasih sayang dan bantuannya secara materi. Serta seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberi semangat, dukungan dan doa untuk penulis
8. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara terkhusus Kelas G *Old Public Administration* dan Kelas G atas semangat dan kebersamaannya. Untuk sahabat tercinta WIK'S Squad yang sudah seperti saudara bagi penulis diperantauan, sahabat dan teman seperjuangan Andi Nurfadillah, M. Asrar AS, Site Nurfatieha, Kasmira, Wahyuningsih Abdullah, Nur Hikmah, Dian Maharani, Muh. Edi Hamka, atas semangat dan



bantuannya serta teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis.

9. Untuk saudari Mardhatillah yang telah memberikan motivasi dan dorongan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan semua pihak yang telah membantu Penulis selama ini dengan pahala terbaik. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 25 September 2019



**YANSAR**  
**YANSAR**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM PENGUJI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Konsep dan teori .....	6
B. Kerangka Pikir .....	29
C. Fokus Penelitian.....	30
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	33
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	33
C. Sumber Data.....	34
D. Informan Penelitian.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Keabsahan Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
1. Gambaran Umum Kabupaten Jeneponto .....	38
2. Profil Bappeda Kabupaten Jeneponto .....	41
3. Proses Perumusan Program dan Kebijakan Bappeda.....	46
B. Hasil Penelitian .....	51
1. <i>Quantity of work</i> (kuantitas kerja).....	51
2. <i>Quqlity of work</i> (kualitas pekerjaan) .....	57
3. <i>Job knowledge</i> (pengetahuan kerja).....	59
4. <i>Creativeness</i> (kreativitas).....	61
5. <i>Cooperation</i> (kerja sama).....	63
6. <i>Dependabiliti</i> (keteguhan).....	65
7. <i>Initiative</i> (prakarsa).....	68
8. <i>Personal Qualities</i> (kualitas pribadi) .....	70
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	71
1. <i>Quantity of work</i> (kuantitas kerja).....	72
2. <i>Quqlity of work</i> (kualitas pekerjaan) .....	72
3. <i>Job knowledge</i> (pengetahuan kerja).....	73
4. <i>Creativeness</i> (kreativitas).....	73
5. <i>Cooperation</i> (kerja sama).....	74
6. <i>Dependabiliti</i> (keteguhan).....	75
7. <i>Initiative</i> (prakarsa) .....	75
8. <i>Personal Qualities</i> (kualitas pribadi) .....	76
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	78
 DAFTAR PUSTAKA .....	80
 LAMPIRAN	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Tangga Tingkatan Partisipasi Masyarakat .....	26
Gambar 2.2. Kerangka Pikir.....	30





## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Informan Penelitian.....	34
Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Jeneponto.....	40
Tabel 4.2. Daftar Prioritas Usulan Kegiatan Hasil Musrembang.....	53
Tabel 4.3. Daftar Hadir Peserta Musrembang.....	67



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat fundamental dalam organisasi, apapun bentuk dan tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi misi untuk kepentingan didalam maupun diluar organisasi. Pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi, menuntut setiap organisasi mendapatkan pegawai yang mempunyai kompetensi, integritas, berkualitas, dan produktif untuk melaksanakan tugas dan wewenang didalam suatu organisasi.

Pengembangan sumber daya manusia juga memiliki hubungan langsung dengan profitabilitas organisasi. Setiap organisasi disarankan untuk terus mengoptimalkan kinerja pegawai dalam memberikan partisipasi yang optimal, antara lain dengan cara melakukan suatu program pelatihan serta pengembangan agar pegawai memiliki keterampilan yang memadai. Hal ini juga berkaitan dengan produktivitas organisasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan.

Halnya dengan organisasi pemerintahan, dimana kinerja pegawai terkait dengan penyediaan layanan publik. Meskipun merupakan sebuah lembaga nonprofit, pegawai juga harus mempunyai standar kapasitas tinggi karena hal itu dapat mempengaruhi nama baik organisasi pemerintah. Salah satu indikator yang harus dimiliki oleh pegawai adalah pendidikan. Faktor-faktor lain dari pengembangan sumber daya manusia memiliki hubungan dengan kinerja pegawai seperti, promosi pekerjaan, pengembangan karir, mutasi dan kompensasi.

Sehingga melalui pengembangan tersebut, pegawai akan bekerja dengan tekun dan mempunyai prinsip transparansi dan profesionalisme sebagai penggerak utama yang pada akhirnya akan menumbuhkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”.

Kinerja juga dapat dipengaruhi melalui hubungan tak langsung antara kepuasan kerja terhadap motivasi kerja. Kepuasan kerja sendiri diartikan sebagai suatu sikap positif yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap apa yang diharapkan akan diperoleh melalui upaya-upaya yang dilakukan dalam melaksanakan suatu pekerjaan dengan hasil atau ganjaran yang diterimanya. Sehingga kinerja sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu pekerjaan baik instansi swasta maupun pemerintahan.

Kinerja dalam instansi pemerintahan sangat diprioritaskan terhadap semua pegawai dalam keberhasilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seperti pada instansi Bappeda Kabupaten Jeneponto memerlukan pegawai yang mempunyai kinerja yang baik dalam pembangunan daerah. Akan tetapi, melihat dengan adanya pembangunan yang mangkrak seperti pembangunan jembatan yang ada di lingkungan Bosalia. Seperti yang dilaksir oleh JENEPONTO, GREENBERITA.COM, sekedar diketahui, rekanan jembatan tersebut dikerjakan oleh PT. Trikarya Utama Cendana dengan total anggaran lebih

dari 4 Milyar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2016. Namun pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Kelurahan Sidenre dengan Kelurahan Monro-Monro, di Kecamatan Binamu, Mangkrak dan tidak diselesaikan pihak rekanan, sehingga kuat dugaan terjadi tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 600 Juta.

Pendekatan perencanaan pembangunan yang kini sedang dikembangkan adalah perencanaan pembangunan partisipatif. Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (*bottom-up approach*). Nampaknya mudah dan indah kedengarannya, tetapi jelas tidak mudah implementasinya Karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk bagaimana sosialisasi konsep itu di tengah-tengah masyarakat.

Perencanaan pembangunan yang melibatkan semua unsur/komponen yang ada dalam masyarakat tanpa membedakan ras, golongan, agama, status sosial, pendidikan, tersebut paling tidak merupakan langkah positif yang patut untuk dicermati dan dikembangkan secara berkesinambungan baik dalam tataran wacana pemikiran maupun dalam tataran implementasinya di tengah-tengah masyarakat. Sekaligus, pendekatan baru dalam perencanaan pembangunan ini yang membedakan dengan pola-pola pendekatan perencanaan pembangunan sebelumnya cenderung sentralistik.



Perencanaan pembangunan partisipatif dapat menyaring semua aspirasi dari masyarakat serta ikut melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh instansi Bappeda, akan tetapi pada kenyataannya masyarakat Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu masih mengeluhkan dengan kondisi lingkungannya yang dimana usulan program perbaikan jalan yang dulunya diusulkan sampai sekarang belum ada tanggapan positif dari pemerintah dilihat dari belum terealisasikan perbaikan jalan yang ada di Kelurahan Sidenre.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah peneliti kemukakan, maka judul peneliti ini adalah **“Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Jeneponto”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dari masalah utama penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

Bagaimana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Jeneponto?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

Untuk mengetahui Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Jeneponto.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga pemerintahan dalam upaya mengatasi masalah-masalah pembangunan dan pemeliharaan prasarana/infrastruktur di masa yang akan datang.
- b. Sebagai upaya pembenahan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih baik kedepannya.

##### 2. Manfaat teoritis

- a. Sebagai salah satu bahan bacaan atau sumber referensi yang dimiliki oleh Perpustakaan Program strata 1 (S1) Universitas Muhammadiyah Makassar.
- b. Sebagai salah satu sumber data dan informasi atau bahan referensi dasar bagi para mahasiswa dan peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian, Konsep dan Teori**

##### **1. Konsep Sumber Daya Manusia**

###### **a. Pengertian Sumber daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu organisasi. Kegagalan dalam mengelola sumber daya manusia dapat berakibat hal-hal yang tidak diinginkan atau mengakibatkan timbulnya gangguan dalam pencapaian tujuan didalam organisasi, baik dalam profit, kinerja, maupun kelangsungan hidup didalam organisasi itu sendiri.

Menurut Hasibuan (2003) Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan terpadu dari daya fisik dan pikir yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya sendiri dimotivasi dari keinginan untuk memenuhi kepuasannya. SDM terdiri dari daya fisik dan daya fikir setiap manusia, tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya fikir dan daya fisiknya. Sumber daya manusia digunakan secara relevan sebagai pendorong sumber daya lain dan memiliki posisi strategis yang berkontribusi untuk mewujudkan kinerja organisasi dengan keunggulan kompetitif (Wright 2007).

Sumber daya manusia menjadi unsur pokok dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang canggih pun tanpa peran aktif SDM tidak berarti apa-apa. Daya pikir diartikan sebagai sebuah pemahaman atau kecerdasan seseorang yang dibawa lahir (modal dasar) sedangkan daya fisik atau disebut juga sebagai

kecakapan diperoleh dari lingkungan dimana dia beradaptasi dan dapat juga diperoleh dari pembelajaran dan pelatihan, kecerdasan tolok ukurnya Intelligence Quotient (IQ) dan Emotion Quality (EQ).

#### **b. Manajemen sumber daya manusia**

Manajemen sumber daya manusia (*human resources management*) adalah pengembangan, penilaian, pendayagunaan, pemberian balas jasa dan pengelolaan individu, anggota organisasi, atau kelompok pekerja. Manajemen SDM juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, pengembangan karyawan, penyusunan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan perubahan yang mulus (simamora, 2001:3).

Manajemen sumber daya manusia yaitu bagian yang tak pernah terpisahkan dari manajemen dalam suatu organisasi. Kegunaan manajemen sumber daya manusia ialah untuk meningkatkan kontribusi seseorang dalam organisasi dengan cara-cara yang secara etis, strategis, sosial, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Manajemen sumber daya manusia memberikan pengaruh positif serta memberikan sumbangsi secara langsung pada peningkatan produktivitas melalui penemuan cara-cara yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

## **2. Konsep Kinerja**

### **a. Kinerja Pegawai**

Menurut As'ad (2001) mengatakan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai



wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kinerja pegawai (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2005).

Menurut Moeheriono (2012:95) Kinerja yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan visi misi, sasaran dan tujuan organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategi suatu organisasi. Melihat definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa kinerja pegawai sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan. Namun perlu dipahami juga bahwa kinerja itu bukan sekadar hasil atau prestasi kerja, tetapi juga mencakup bagaimana suatu proses pekerjaan itu berlangsung.

Kinerja juga dapat dipengaruhi melalui hubungan tak langsung antara kepuasan kerja terhadap motivasi kerja, hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Murti dan Srimulyani (2013) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan mediasi antara motivasi kerja terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja. Dengan terpenuhinya semua kebutuhan atau keinginan dalam diri pegawai, maka akan tercipta perasaan puas, dan pegawai yang tingkat kepuasannya tinggi maka secara otomatis juga mengalami peningkatan dalam kinerja. Menurut kedua definisi diatas menekankan pada pentingnya motivasi kinerja yang diberikan oleh pemimpin kepada bawahannya.

Menurut Lidia Lustri & Hotland siagian (2017) dalam jurnal Agora Vol 5 No. 1 dengan judul *Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Mediasi Pada Karyawan PT. Borwita Citra Prima Surabaya* dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja seseorang juga berpengaruh terhadap motivasi yang dimiliki oleh seseorang, kegigihan yang dimiliki oleh seseorang akan menentukan tingkat usaha mengenai seberapa keras usaha seseorang untuk bekerja sesuai dengan perilaku yang dipilihnya dan akan melahirkan kepuasan kerja yang baik.

Kepuasan kerja sendiri diartikan sebagai suatu sikap positif yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap apa yang diharapkan akan diperoleh melalui upaya yang dilakukan dalam melaksanakan suatu pekerjaan dengan hasil atau ganjaran yang diterimanya (Suparyadi,2015).

Kebutuhan atau keinginan dalam diri pegawai ini yang kemudian disebut sebagai motivasi kerja. Motivasi sendiri diartikan sebagai suatu dorongan atau penggerak dalam diri manusia yang dapat mengarahkan, menimbulkan, dan mengorganisasikan tingkah laku (Darmawan 2013).

Motivasi merupakan faktor yang krusial yang melaksanakan suatu pekerjaan. Perbedaan motivasi membuat setiap orang berperilaku, bereaksi, berinteraksi berbeda terhadap suatu jenis pekerjaannya. Selain itu tinggi rendahnya motivasi seseorang juga berpengaruh terhadap prestasi kerjanya, karena menurunnya motivasi dapat menurunkan prestasi dan meningkatnya motivasi dapat juga meningkatkan prestasi.

## **b. Indikator Kinerja**

Banyak terdapat pengertian indikator kinerja atau disebut *performance indicator*, ada yang mendefinisikan bahwa: 1) indikator kinerja sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang dipergunakan untuk mengukur output atau outcome dalam suatu kegiatan; 2) sebagai alat ukur yang digunakan dalam menentukan derajat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya; 3) sebagai ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat tercapainya suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi; 4) suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja.

Indikator sebagai alat yang dipergunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi tertentu. Sebagai contoh apabila suatu hasil pekerjaan seseorang dikatakan sangat memuaskan, untuk menjelaskan mengenai hal tersebut harus ada indikator yang menjelaskan tingkat pekerjaan tersebut.

Indikator kinerja (*performance indicator*) sering disamakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*), namun sebenarnya meskipun keduanya merupakan sama-sama dalam kriteria pengukuran kinerja, tetapi terdapat perbedaan dari makna dan artinya. Pada indikator kinerja (*performance indicator*) mengacu kepada penilaian kinerja secara langsung, yaitu hal-hal yang bersifat hanya merupakan indikasi kinerja saja, sehingga bentuknya cenderung *kualitatif* atau tidak dapat dihitung. Sedangkan ukuran kinerja (*performance measure*) adalah kriteria yang mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, sehingga bersifat kuantitatif atau dapat dihitung.

### **c. Ukuran Indikator Kinerja**

Manajemen puncak atau atasan harus mampu mendapatkan hasil penilaian mengenai kinerja organisasi secara cepat dan komperhensif dalam sebuah laporan. Terlalu banyak ukuran yang akan dijadikan bahan penilaian, justru dapat mengalihkan perhatian manajemen puncak dari ukuran-ukuran yang lebih diprioritaskan. Oleh karenanya, untuk dapat melakukan hal tersebut, maka pihak manajemen harus membatasi jumlah ukuran-ukuran yang akan dipergunakan hanya pada yang penting-penting saja yaitu yang dapat membantu mereka yang mengetahui apakah organisasi dapat berkinerja dengan baik dan hal-hal penting apa saja yang harus diperbaiki agar organisasi dapat meningkatkan kinerjanya.

Walaupun tidak ada jumlah yang disepakati mengenai jumlah indikator yang strategis untuk mengukur kinerja suatu organisasi, namun dalam praktik biasanya menetapkan antara 3 sampai 10. Indikator kinerja untuk setiap level organisasi, tergantung dari kompleksitas organisasi itu. Pemilihan atas ukuran-ukuran penting untuk menilai keberhasilan organisasi akan menghasilkan kerangka kerja pengukuran yang berbeda-beda.

Pada umumnya, ukuran indikator kinerja dapat dikelompokkan dalam kategori berikut ini. Namun demikian, organisasi tertentu dapat mengembangkan kategori masing-masing yang sesuai dengan misinya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Efektif, indikator ini mengukur tingkat kesesuaian output yang dihasilkan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan dengan waktu yang telah ditentukan.



- 2) Efisien, indikator ini mengukur tingkat kesesuaian proses menghasilkan output dengan menggunakan biaya sekecil mungkin.
- 3) Ketepatan waktu, indikator ini mengukur apakah suatu pekerjaan telah diselesaikan secara benar dan tepat waktu.
- 4) Keselamatan, indikator ini mengukur kesehatan organisasi secara keseluruhan serta lingkungan kerja pegawainya ditinjau dari aspek keselamatan.

Sedangkan indikator kinerja menurut Gomes (Onibala 2017) yaitu sebagai berikut:

- 1) *Quantity of work* (kuantitas kerja)

*Quantity of work* (kuantitas kerja) merupakan jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang ditentukan.

- 2) *Quqlity of work* (kualitas pekerjaan)

*Quqlity of work* (kualitas pekerjaan) merupakan kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya.

- 3) *Job knowledge* (pengetahuan kerja)

*Job knowledge* (pengetahuan kerja) merupakan luasnya penegetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya.

- 4) *Creativeness* (kreativitas)

*Creativeness* (kreativitas) merupakan keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dari tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya.

5) *Cooperation* (kerja sama)

*Cooperation* (kerja sama) merupakan ketersediaan untuk bekerjasama dengan orang lain.

6) *Dependability* (keteguhan)

*Dependability* (keteguhan) merupakan kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan penyelesaian kerja tepat waktunya.

7) *Initiative* (prakarsa)

*Initiative* (prakarsa) merupakan semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggung jawabnya.

8) *Personal qualities* (kualitas pribadi)

*Personal qualities* (kualitas pribadi) yaitu menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramahmataman dan integritas pribadi.

**d. Penetapan Indikator Kinerja Publik**

Penetapan indikator kinerja menurut Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Administrasi Negara (AKIP-LAN) adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan organisasi. Untuk penetapan indikator kinerja kegiatan tersebut haruslah didasarkan pada perkiraan yang realistis dan rasional dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta data pendukung yang ada dalam organisasi. Indikator kinerja yang dimaksud hendaknya:

- Spesifik dan jelas
- Dapat diukur secara objektif
- Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

- Tidak bias

Sedangkan, menurut USAID menyatakan bahwa indikator kinerja tersebut harus dapat didefinisikan, apakah itu indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang penting dapat diukur. Selain itu, perlu juga ditentukan secara tepat aspek-aspek teknis dari pernyataan indikator, termasuk didalamnya adalah definisi unit pengukuran. Artinya, indikator kinerja apa saja yang akan ditetapkan harus bersifat jelas, tepat, dan dapat diukur. Untuk itu pada uraian dibawah ini akan disajikan indikator kinerja dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yaitu, Masukan (inputs), Keluaran (outputs), Hasil (outcome), Manfaat (benefits), dan Dampak (impacts).

#### **e. Evaluasi Kinerja**

Evaluasi kinerja adalah suatu proses penilaian pelaksanaan tugas suatu pekerjaan (performance) individu atau sekelompok orang ataupun unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi yang telah sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu.

Evaluasi kinerja atau yang dapat pula diartikan sebagai penilaian prestasi kerja merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang penting yaitu pengawasan dan evaluasi (*controlling and evaluating*).

Pelaksanaan evaluasi kinerja perlu didukung oleh beberapa sistem. Pertama, perlu metode atau cara pengukuran, waktu pengukuran evaluasi kinerja, dan pelaksanaan. Kedua, untuk pengukuran tersebut perlu adanya tolok ukur atau standar sebagai bahan pembanding atau terhadap mana pencapaian organisasi,

pencapaian individu, atau unit kerja. ketiga adalah uraian jabatan. Uraian jabatan perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga mudah diukur secara kuantitatif.

Keempat, uraian jabatan dapat dirumuskan sebagai hasil dari analisis jabatan. Dengan kata lain, analisis jabatan merupakan sistem pendukung EK yang penting.

#### **f. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja**

Ada tiga faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai menurut Payaman J Simanjuntak (2005). 1) Faktor individu, faktor individu merupakan kemampuan dan keterampilan yang didapatkan dijenjang pendidikan dalam melakukan pekerjaan serta motivasi yang dimiliki dalam diri seseorang. 2) Faktor dukungan organisasi, dalam melaksanakan tugasnya pegawai memerlukan dukungan organisasi tempat dia bekerja. Dukungan tersebut adalah bentuk penyediaan sarana dan prasarana kerja, uraian tugas dan jabatan, kenyamanan lingkungan kerja, pengorganisasian, serta kondisi dan syarat kerja. 3) Faktor dukungan manajemen, kinerja pegawai juga sangat tergantung pada keterampilan konseptual atau keterampilan teknis yang dimiliki oleh pimpinan, sehingga dapat membangun dan mengembangkan kompetensi pegawai serta sistem kerja dan hubungan industrial yang aman dan harmonis.

### **3. Konsep Perencanaan Pembangunan Partisipatif**

#### **a. Konsep Perencanaan**

Dalam mencapai tujuan pada suatu organisasi perlu dibuat perencanaan. Perencanaan diperlukan karena adanya kelangkaan/keterbatasan sumber daya

termasuk sumber dana yang tersedia sehingga mengharuskan mempertimbangkan skala prioritas dalam menentukan suatu pilihan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Menurut Siagian (2008:88) “perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan”. Perencanaan merupakan suatu proses untuk memikirkan permasalahan yang sedang dihadapi dan memikirkan alternatif pemecahannya serta memikirkan kondisi ideal yang diharapkan. Grijns dalam Syafrudin (1993:22), berpendapat bahwa perencanaan merupakan suatu metode praktis sebagai alat pendekatan yang sistematis dan ilmiah. Pemikirannya berpijak pada suatu dikotomi yang membagi perencanaan dalam arti sempit dan perencanaan dalam arti luas. Davidov dan Reiner dalam Syafrudin (1993 :5), mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menetapkan tindakan yang selanjutnya.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan perencanaan merupakan suatu proses penentuan pilihan terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu, penentuan pilihan terhadap alternatif-alternatif tindakan yang perlu dilakukan, kemudian mengarahkan setiap tindakan agar pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan. Perencanaan terdiri dari beberapa tahapan yang dilalui untuk dapat mencapai suatu perencanaan yang ideal. Abe (2005:77) mengidentifikasi bahwa tahapan perencanaan terdiri dari enam langkah perencanaan yaitu penyelidikan, perumusan masalah, identifikasi daya dukung, rumusan tujuan, menetapkan langkah-langkah dan penentuan anggaran.



Dengan mempertimbangkan kompleksnya permasalahan yang hendak dipecahkan, sumber daya yang tersedia, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan alternatif yang terbaik dan kebijakan yang hendak ditempuh, maka diperlukan perencanaan yang baik. Perencanaan mempunyai peran yang strategis, dalam perencanaan harus dapat menentukan pilihan alternatif yang terbaik dengan memperhatikan permasalahan yang hendak dipecahkan dan sumberdaya yang dimiliki. Berawal dari perencanaan yang baik maka diharapkan akan mendapatkan hasil yang baik pula (Riyadi dan Bratakusumah 2004:3).

Jadi didalam perencanaan yang dibuat harus memuat asumsi-asumsi yang berdasarkan fakta-fakta, karena dengan data dan fakta yang ada maka alternatif yang hendak dilaksanakan lebih tepat sasaran. Perencanaan juga memuat berbagai alternatif pilihan yang harus ditentukan dengan menggunakan skala prioritas karena begitu banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan tidak dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Perencanaan juga menghendaki adanya tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yang hendak dicapai tersebut berupa keadaan ideal yang diharapkan untuk diwujudkan.

Perencanaan juga mempunyai sifat memprediksi sebagai upaya antisipasi kemungkinan yang dapat terjadi serta adanya kebijaksanaan yang harus dilakukan, karena perencanaan tidak dapat memastikan keadaan yang akan datang baik keadaan yang mendukung maupun keadaan yang dapat berpotensi untuk menghambat atau bahkan menghalangi pelaksanaan kegiatan (Riyadi dan Bratakusumah (2004:4). Abe (2005:31), perencanaan yang baik haruslah memuat prinsip yang termuat dalam dokumen perencanaan adalah apa yang akan

dilakukan, yang merupakan jabaran dari misi dan visi; bagaimana mencapai hal tersebut; siapa yang akan melakukan; lokasi aktifitas; kapan akan dilakukan, berapa lama; dan sumberdaya yang dibutuhkan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek penting yang harus menjadi perhatian dalam menyusun suatu rencana. Aspek penting dalam menyusun rencana tersebut adalah bahwa dalam perencanaan merupakan usaha untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam masyarakat dan tujuan yang hendak dicapai dengan memperhatikan aspek sumberdaya yang dimiliki. Dalam perencanaan juga terkandung aspek alternatif pilihan, karena tidak semua permasalahan dapat diselesaikan sekaligus, tetapi ada skala prioritas. Aspek yang terakhir adalah aspek kebijaksanaan sebagai usaha untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Selain hal tersebut di atas, perencanaan juga harus konsisten dan realistis, disertai pengawasan yang kontinyu, mencakup aspek fisik dan pembiayaan, mempunyai koordinasi dan para perencananya harus memahami permasalahan ekonomi.

#### **b. Mekanisme Normatif Perencanaan Pembangunan Daerah**

Perencanaan merupakan suatu kegiatan pendahuluan yang harus dilakukan sebelum kegiatan pokok dilaksanakan. Perencanaan diperlukan karena adanya kelangkaan/keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang tersedia sehingga tidak menyulitkan dalam menentukan suatu pilihan kegiatan. UU 25 Tahun 2004 Tentang SPPN, dimana perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem

perencanaan pembangunan nasional, termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional, yang ketentuannya diatur pula dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Penyempurnaan sistem perencanaan dilakukan baik dalam hal proses maupun tahapannya. Pendekatan perencanaan tersebut meliputi: pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, dan pendekatan *bottomup* (bawah-naik) dan *top-down* (atas-turun).

Pendekatan *top-down* perencanaan pembangunan tahunan dimulai ketika setiap tingkat pemerintahan memberikan acuan dan keputusan anggaran tahunan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya. Pendekatan *bottom-up*, merupakan proses konsultasi di mana setiap tingkat pemerintahan menyusun *draft* proposal pembangunan tahunan berdasarkan proposal yang diajukan oleh tingkat pemerintahan di bawahnya. Adapun perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan melalui tahapan dari tingkat yang paling rendah yaitu:

- 1) Musrenbang tingkat desa/kelurahan, yang merupakan koordinasi perencanaan pembangunan partisipatif yang dimulai sejak dilakukan kegiatan indentifikasi masalah dan kebutuhan yang menjadi aspirasi Masyarakat.
- 2) Musrenbang tingkat kecamatan, yang bertujuan untuk mensinergikan dan mensinkronisasikan hasil-hasil musrenbang dalam satu wilayah kecamatan sehingga menjadi suatu usulan yang sistematis, mantap, dan terpadu untuk dibawa ke forum perencanaan selanjutnya.

- 3) Forum SKPD kabupaten/kota, forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sector dan lintas sector, adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan rancangan rencana kerja SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tatacara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
- 4) Musrenbang tingkat kabupaten/kota, yaitu musyawarah *stakeholders* kabupaten/kota untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten/kota berdasarkan Renja-SKPD hasil forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD. Musrenbang tingkat kabupaten/kota berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kegiatan antar lembaga/satuan kerja perangkat daerah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

### **c. Perencanaan Partisipatif**

Pada akhir tahun 1960-an, beberapa perencana tertarik dalam mengintegrasikan kesadaran politik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem perencanaan. Paul Davidoff (Chaowarat 2010:27), menyatakan bahwa tidak mungkin bagi perencana yang sepenuhnya bebas nilai, karena perencana sebagai orang-orang yang mempunyai nilai. Perencana harus sadar nilai, perencana tidak hanya menyatakan nilai-nilai professional mereka tetapi juga harus dapat

menyatakan nilai-nilai kliennya yang ingin dicapainya. Perencana tidak hanya memiliki kemampuan teknis saja melainkan juga dapat menjadi fasilitator yang mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan politik dalam setiap karyanya.

Perencanaan partisipatif adalah paradigma alternatif dalam perencanaan yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam proses pengambilan keputusan publik. Didalamnya perencanaan dianggap sebagai arena politik masyarakat sipil bisa bernegosiasi atau berdebat dengan negara.

Pada tahun 1960an perencanaan partisipatif ini ditekankan sebagai alternatif perencanaan konvensional yang dipandang tidak sesuai dengan keadaan sosial ekonomi yang lazim. Pengembangan secara bertahap dari perencanaan partisipatif telah terjadi bersama dari konsep masyarakat sipil (Chaowarat 2010:159). Lebih lanjut dijelaskan keberhasilan perencanaan partisipatif berhubungan dengan konsep masyarakat sipil sebagai politik yang ideal.

Hal ini mengacu pada bidang politik terdiri dari asosiasi warga negara, posisi antara negara dan individu. Keseluruhan kekuatan masyarakat sipil adalah persyaratan yang penting dari perencanaan partisipatif. Tidak seperti pendekatan konvensional, metode alternatif perencanaan mendorong warga untuk berbagi keputusan-keputusan publik dengan negara. Diharapkan bahwa perencanaan partisipatif akan meningkatkan kualitas rencana dengan membuat mereka lebih responsif terhadap keragaman kepentingan; mengurangi korupsi dalam proses perencanaan, dan menghasilkan konsensus yang akan membuat rencana diimplementasikan. Nilai-nilai positif yang dapat diharapkan dari penerapan perencanaan partisipatif adalah adanya kesesuaian berbagai program dan kegiatan



yang akan dilaksanakan dengan berbagai kepentingan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Penerapan perencanaan partisipatif dapat mengurangi korupsi dalam proses perencanaan karena warga negara turut melakukan negosiasi dengan negara untuk mencapai kesepakatan dalam menentukan keputusan-keputusan publik. Warga negara dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan karena dalam proses perencanaannya telah melibatkan warga negara dan keputusan publik yang diambil oleh negara merupakan konsensus dari negara dan warga negara. Menurut Smith (1973:279), perencanaan partisipatif mensyaratkan adanya keterlibatan individu dan kelompok yang ada di dalam masyarakat dalam membuat keputusan. Perencanaan partisipatif terdiri dari tiga aspek yaitu aspek rasional, aspek konsensual dan aspek pribadi dan sosial.

Hal yang sama disampaikan oleh Krek (2005:2) bahwa keterlibatan masyarakat dan partisipasi telah menjadi tema penting dalam perencanaan teori dan praktek. Upaya perencanaan partisipatif terhadap didasarkan pada asumsi bahwa orang bersedia untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan spasial. Tujuan dari perencanaan partisipatif tidak hanya untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang kegiatan yang direncanakan tetapi juga untuk bekerjasama dengan masyarakat dan untuk berbagi pengetahuan pengetahuan dan gagasan dalam masyarakat.

Dalam pemerintahan yang demokratis proses perencanaan partisipatif yang melibatkan semua orang yang memiliki kepentingan dalam pengambilan keputusan-keputusan, dapat melalui pertemuan-pertemuan langsung maupun

melalui sebuah sistem perwakilan seperti yang disampaikan oleh Wakely (2008:3). Selanjutnya Abe (2005:88), perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung).

#### **4. Konsep Partisipasi Masyarakat**

##### **a. Pengertian partisipasi masyarakat**

Pengertian partisipasi menurut Mubyarto dalam Ndraha (1990:102) mendefinisikannya sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi warga menurut Sumarto (2003 :17) adalah “proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka”. Partisipasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut mempengaruhi suatu kebijakan sejak awal yaitu mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauannya.

Fung (2006:24) mengatakan bahwa dalam kerangka demokrasi, partisipasi merupakan cermin dari nilai-nilai demokrasi yang penting yaitu: legitimasi, keadilan dan efektivitas tindakan publik. Selain itu, tidak ada desain partisipatif tunggal cocok untuk melayani semua tiga nilai sekaligus; desain tertentu yang cocok untuk tujuan tertentu.

Partisipasi memberikan legitimasi bagi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses

pembangunan karena upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Menurut Romeo (2000:1), partisipasi juga mencerminkan keadilan karena setiap individu dalam masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam usaha untuk meningkatkan kehidupannya. Desentralisasi memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah menggunakan sumber daya yang dimiliki guna melakukan pembangunan, terutama sumber daya manusia, dalam hal ini masyarakat yang bertindak sebagai subyek pembangunan.

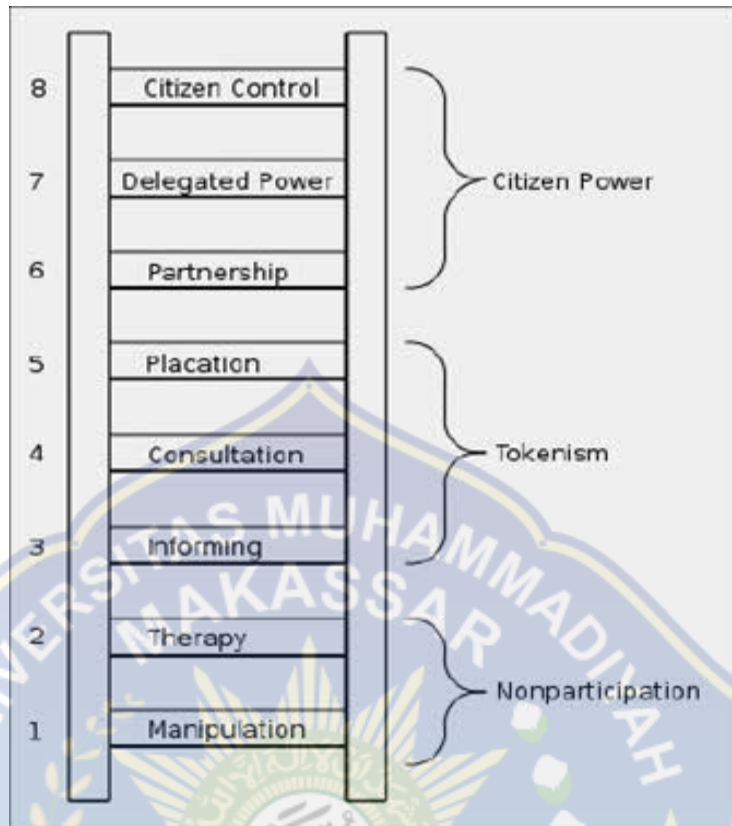
#### **b. Bentuk-bentuk partisipasi**

Masyarakat dalam berpartisipasi dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Adapun Robert Chambers menyebutkan ada 3 model partisipasi yang dikemukakan para ahli, seperti menurut Arnstein yang mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat terdapat 8 tingkatan, berbeda dengan Kenji dan Greenwood justru dalam membagi jenjang partisipasi dipersempit menjadi 5 tingkatan, sedangkan VeneKlasen dengan Miller membagi jenjang partisipasi berjumlah 7 tingkatan. Dari beberapa pendapat para teoritis, pada intinya goal yang diinginkan dari partisipasi masyarakat yaitu munculnya kemandirian masyarakat dalam mengontrol atau memobilisasi diri.

Menurut Arnstein (Wakely 2008:2), bahwa membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam 8 tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan kekuasaan yang diberikan

oleh kepada masyarakat. Tingkatan partisipasi mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah menurutnya adalah *citizen control* (pengawasan warga) pada tingkat ini masyarakat menguasai kebijakan publik mulai dari perumusan, implementasi, evaluasi dan kontrol (pengawasan); *delegated power* (pendelegasian wewenang) berarti bahwa pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa keperluannya; *partnership* (kemitraan) adalah kondisi dimana pemerintah dan masyarakat merupakan mitra sejajar; *placation* (penentraman) komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dan pemerintah; *consultation* (konsultasi) telah terjadi komunikasi dan bersifat dua arah; *informing* (informasi) komunikasi sudah mulai banyak terjadi tetapi masih bersifat satu arah; *therapy* (terapi) berarti sudah ada komunikasi namun masih terbatas, inisiatif datang dari pemerintah dan sifatnya hanya satu arah; *manipulation* (manipulasi) bisa diartikan tidak ada komunikasi apalagi dialog antara pemerintah dan masyarakat.

Sejalan dengan penjelasan 8 tingkatan partisipasi, sigit mengutip pernyataan Arnstein yang berkaitan dengan tipologi diatas dimana terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu tidak ada partisipasi sama sekali (*non participation*) yang meliputi *manipulation* dan *therapy*, partisipasi masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan (*degrees of tokenism*), meliputi *informing*, *consultation*, dan *placation*, partisipasi masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan (*degrees of citizen power*), meliputi *partnership*, *delegated power*, dan *citizen control*.



Gambar 2.1 : Delapan Tangga Tingkatan Partisipasi Masyarakat (Arnstein)

Dua tangga terbawah dikategorikan sebagai “*non participation*” dengan menempatkan bentuk-bentuk partisipasi yang dinamakan *manipulation* dan *therapy*. Sasaran dari kedua tingkatan ini adalah mendidik dan mengobati masyarakat yang berpartisipasi. Tangga ketiga, keempat, dan kelima sebagai tingkat *Tokenism*. *Tokenism* yaitu suatu tingkat partisipasi dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak boleh memiliki kemampuan untuk mendapat jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Termasuk dalam tingkat *Tokenism* yaitu *informing*, *consultation*, dan *placation*. Kemudian tiga tangga teratas dikategorikan ke dalam tingkat kekuasaan masyarakat (*citizen power*).



Masyarakat dalam tingkatan ini memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan sengan menjalankan kemitraan (*partnership*) dengan memiliki kemampuan tawar menawar bersama-sama pengusaha atau pada tingkatan yang lebih tinggi, pendelegasian kekuasaan (*delegated power*), dan pengawasan masyarakat (*citizen control*).

## **5. Jenis Perencanaan Pembangunan**

Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

### **a. Perencanaan Jangka Panjang**

Perencanaan jangka panjang (Perspektif) biasanya mempunyai rentang waktu antara sepuluh sampai 25 tahun. Rencana pembangunan jangka panjang dapat digolongkan sebagai perencanaan perspektif karena jangkauannya yang melintasi beberapa tahun. Contoh Negara-negara yang mempunyai perencanaan jangka panjang adalah Malaysia, Korea Selatan, dan Indonesia. Di Indonesia, pada masa pemerintahan Presiden soeharto pernah terdapat Garis-Garis Bsar Haluan Negara (GBHN) dan pola dasar pembangunan Daerah (Pondas). Berdasarkan SPPN, Indonesia juga mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional/Daerah.

### **b. Perencanaan Jangka Menengah**

Perencanaan jangka menengah biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung dari masa jabatan Presiden atau kepala daerah. Di Indonesia perencanaan jangka menengah mempunyai jangka waktu 5 tahun yang disusun baik oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah nasional.

Perencanaan jangka menengah pada dasarnya adalah jabaran dari perencanaan jangka panjang sehingga bersifat lebih operasional. Selain itu perencanaan jangka menengah memuat juga sasaran dan target pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif supaya besar perencanaan tersebut menjadi lebih terukur dan mudah dijadikan sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi.

c. Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup 1 tahun sehingga sering kali dinamakan sebagai rencana tahunan. Rencana ini pada dasarnya adalah merupakan jabaran dari rencana jangka menengah. Disamping itu perencanaan tahunan ini bersifat sangat operasional karena didalamnya termasuk program dan kegiatan. Karena itu, rencana tahunan ini selanjutnya dijadikan dasar utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah (RAPBD). Rencana tahunan yang mencakup kesemua sector dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sedangkan khusus untuk suatu sector atau bidang dinamakan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

## **6. Tujuan dan Fungsi Perencanaan Pembangunan**

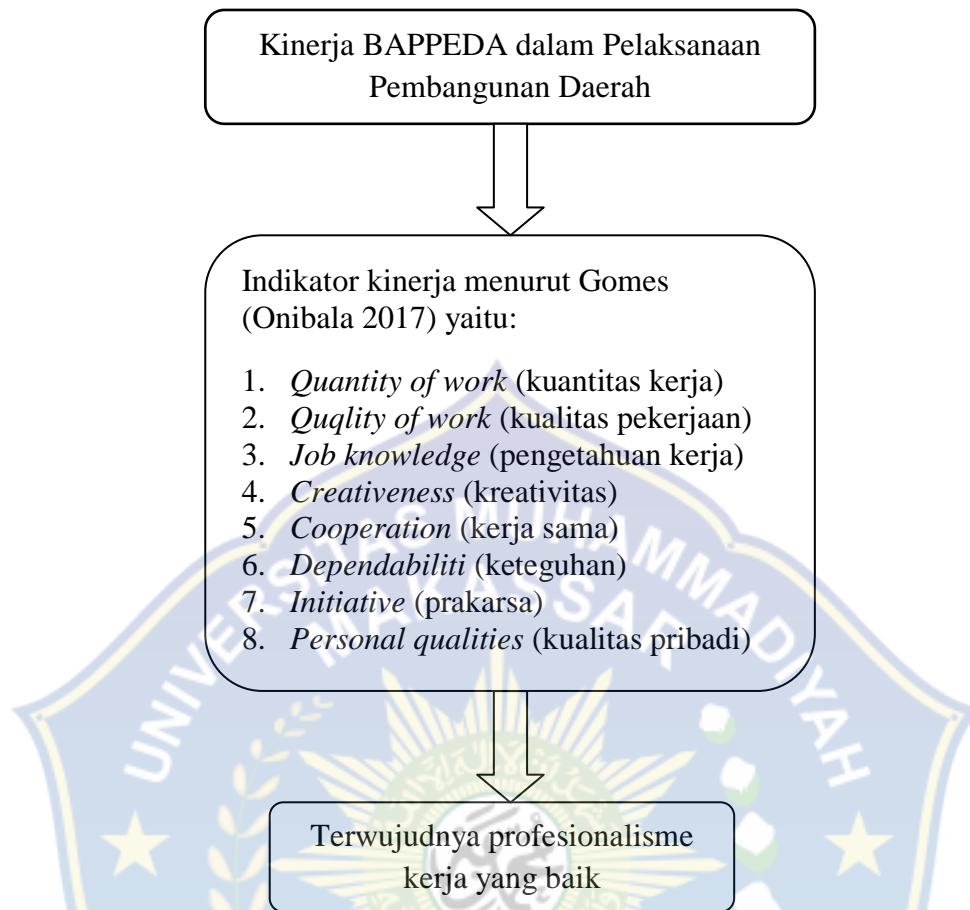
Sesuai dengan Undang-undang No 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok. Tujuan dan fungsi pokok tersebut sebagai berikut;

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
- b. Menjamin terciptanya integrasi sinkronisasi dan sinergi antar daerah
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran pelaksanaan dan pengawasan
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil

## **B. Kerangka Pikir**

Bila para pegawai yang mempunyai kinerja buruk atau gagal berperan secara wajar, seorang pimpinan harus menilai penyebab dari masalah tersebut dengan menganalisis sebuah keadaan yang terlibat dalam kinerja yang tidak memuaskan, seseorang pimpinan maupun manajer dapat menggunakan strategi yang tepat untuk meningkatkan prestasi kerja atau hasil kerja para pegawai sehingga dapat memenuhi standar.

Prestasi pegawai dibawah standar mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari keterampilan kerja yang buruk maupun motivasi yang tidak cukup atau lingkungan kerja yang buruk. Seseorang pegawai yang mempunyai tingkat keterampilan rendah tetapi memiliki sikap yang baik mungkin membutuhkan pelatihan. Karena dibutuhkan strategi yang berbeda untuk memperbaiki kinerja yang buruk serta penyebab kegagalan pegawai. Sehingga penulis menggambarkan bagan kerangka pikir sebagai berikut.



Gambar 2.2. Kerangka Pikir

### C. Fokus Penelitian

Untuk memberikan suatu pemahaman, sehingga dapat memudahkan dalam penelitian, maka perlu adanya beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian. Maka dari itu fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Jenepono.

### D. Deskripsi Fokus

1. Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA).

Salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu menyusun rencana kerja serta mengevaluasi kebijakan tahunan dan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah.

2. *Quantity of work* (kuantitas kerja)

*Quantity of work* (kuantitas kerja) yaitu jumlah pembangunan yang berhasil dibangun atau dapat diselesaikan sesuai dengan jumlah pembangunan yang ditetapkan sebelumnya dalam periode waktu yang telah ditentukan.

3. *Quqlity of work* (kualitas pekerjaan)

*Quqlity of work* (kualitas pekerjaan) merupakan mutu atau kesempurnaan pembangunan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA).

4. *Job knowledge* (pengetahuan kerja)

*Job knowledge* (pengetahuan kerja) Sejauh mana Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) mengetahui tugasnya atau pekerjaan yang dilakukan dan keterampilanya dalam melaksanakan tugasnya sesuai tugas pokok dan fungsinya.

5. *Creativeness* (kreativitas)

*Creativeness* (kreativitas) Dalam hal ini masyarakat dapat menyampaikan atau mengeluarkan ide-ide dan gagasannya untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di Kabupaten Jeneponto.



6. *Cooperation* (kerja sama)

*Cooperation* (kerja sama) dalam hal ini melaksanakan suatu pekerjaan perlu adanya kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat.

7. *Dependability* (keteguhan)

*Dependability* (keteguhan) Dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan pengembangan Daerah (BAPPEDA) dalam melaksanakan tugas perlu adanya keteguhan, selain itu kehadiran sangat penting dipatuhi agar supaya pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan.

8. *Initiative* (prakarsa)

Dalam hal ini perlu adanya semangat dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baru dalam memperbesar tanggung jawabnya dalam pembangunan.

9. *Personal Qualities* (kualitas pribadi)

Dalam mencapai tujuan pembangunan infrastruktur Desa Erelembang yang telah ditetapkan sebelumnya sangat berpengaruh terhadap kualitas pribadi Kepala Desa Erelembang itu sendiri.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Jeneponto dengan jangka waktu 25 Juni s/d 24 Agustus yang difokuskan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Alasan peneliti memilih kantor BAPPEDA karena peneliti melihat adanya usulan program dari masyarakat Kelurahan Sidenre yang tidak pernah direalisasikan oleh pemerintah dan adanya masyarakat yang tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan makna data-data empiric yang berkaitan, dengan hal agar penelitian ini dapat menjelaskan dan menggambarkan tentang Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Jeneponto.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengetahui kinerja Badan Perencanaan Pembangunan penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Jeneponto.

### C. Sumber Data

1. Data Primer dalam penelitian ini yang dibutuhkan oleh peneliti untuk mencari data yang akurat dari keterangan dari pegawai, dan pelaksana pembangunan serta masyarakat yang mengetahui banyak hal tentang proses pembangunan.
2. Data sekunder dalam penelitian ini berupa susunan strktur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta daftar hadir dan daftar usulan program Musrembang Kelurahan Sidenre.

### D. Informan Penelitian

Penelitian mengenai Kinerja Pegawai BAPPEDA memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1. Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan
1	2	3	4
1	Mahmud, S.Hut, M.Si	MM	Kepala Bidang perencanaan makro, evaluasi dan pelaporan
2	Fahmi Sulfikar, SE., MM.	FS	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
3	Rizal Arizandy, SH	RA	Kepala Kelurahan Sidenre
4	Armin Sujanto	AS	LSM Pattiro Jeka
5	Syp. Tuanlombo	ST	Kepala Lingkungan Bosalia
6	H. Bachri Makaraeng	BM	Tokoh Masyarakat
7	Abd. Hakim	AH	Staf Kelurahan Sidenre
8	Abdul Jalil Sikki	AJ	Masyarakat

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut.

### **1. Teknik Observasi.**

Adanya observasi peneliti dapat mengetahui kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Observasi yang dilakukan oleh peneliti ketika berada dilapangan dimulai dengan hal-hal kecil seperti sarana dan prasarana serta lingkungan fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

### **2. Teknik Wawancara**

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang sudah disediakan oleh peneliti karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian dengan mempelajari literature buku-buku yang ada, mencari konsep-konsep teori yang berhubungan erat dengan permasalahan.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dilakukan yaitu proses analisis yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis data dilakukan melalui tiga alur, yakni;

### **1. Reduksi data**

Reduksi data yaitu suatu proses pemilihan, perumusan, dan atau perhatian dari pengabstrakan, penyederhanaan dan transformasi data kasar yang bisa didapatkan dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Selama proses pengumpulan data di dalam penelitian ini, reduksi data yang dilakukan dengan menulis catatan kecil pada kejadian yang dirasa penting.

### **2. Penyajian data**

Hasil reduksi selanjutnya disajikan dalam bentuk teks naratif. Teks naratif digolongkan sesuai topik masalah. Penyajian data merupakan tahapan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya, untuk dianalisis dan diambil tindakan yang dianggap perlu.

### **3. Penarikan kesimpulan**

Kegiatan verifikasi dan menarik kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian dari kegiatan dari konfigurasi yang utuh, karena penarikan kesimpulan juga diverifikasi sejak awal berlangsungnya penelitian sampai akhir penelitian yang merupakan suatu proses berkesinambungan dan berkelanjutan. Verifikasi dan penarikan kesimpulan berusaha mencari makna



dari komponen-komponen yang disajikan dengan mencatat pola-pola, keteraturan, penjelasan, konfigurasi, hubungan sebab-akibat dan prosisi daam penelitian. Penulis melakukan peninjauan kembali terhadap penyajian data melalui diskusi dengan sejawat dan konsultasi dengan pembimbing.

### **G. Keabsahan Data**

Teknik pengumpulan data triangulasi diartikan suatu cara pengumpulan data dengan menggabungkan beberapa cara seperti teknik mengumpulkan data dan sumber data yang ada. Ada tiga macam triangulasi, yakni:

1. Triangulasi sumber, untuk menguji kebenaran sebuah data dilakukan dengan teknik pengecekan data yang sudah didapatkan melalui beberapa sumbernya.
2. Triangulasi teknik, untuk menguji kebenaran sebuah data dilakukan dengan teknik pengecekan data kepada sumbernya yang serupa dengan cara lain atau berbeda. Seperti data yang diperoleh dari observasi, kemudian dicek melalui wawancara, dan dokumentasi.
3. Triangulasi waktu, waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dipagi hari saat narasumbernya masih sangat segar, belum banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar sehingga akan memberikan data yang benar dan valid sehingga data itu dapat dipercaya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Jeneponto**

###### **a. Kondisi Geografis**

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Letak Geografis dan luas Wilayah terletak antara 5°23'-5°42' Lintang Selatan dan 119°29' - 119°56' Bujur Timur. Kabupaten ini berjarak sekitar 91 Km dari Kota Makassar. Kondisi topografi Kabupaten Jeneponto pada bagian utara terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian 500 sampai dengan 1400 meter diatas permukaan air laut (mdpl) yang merupakan lereng pegunungan Gunung Baturape - Gunung Lompobattang. Sedangkan bagian tengah berada di ketinggian 100 sampai dengan 500 mdpl dan pada bagian selatan merupakan pesisir serta dataran rendah dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 100 mdpl. Karena perbatasan dengan Laut Flores maka Kabupaten Jeneponto memiliki pelabuhan cukup besar yang terletak di desa Bungeng.

Kabupaten Jeneponto berbatasan dengan kabupaten yang lain yang ada di Sulawesi Selatan. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar, dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores. Luas wilayah Kabupaten Jeneponto tercatat 749,79 km persegi yang meliputi 11 kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Bangkala
- 2) Kecamatan Batang
- 3) Kecamatan Kelara
- 4) Kecamatan Binamu
- 5) Kecamatan Tamalatea
- 6) Kecamatan Bontoramba
- 7) Kecamatan Rumbia
- 8) Kecamatan Turatea
- 9) Kecamatan Tarowang
- 10) Kecamatan Arungkeke
- 11) Kecamatan Bangkala Barat

**b. Visi Misi Kabupaten Jeneponto**

**1) Visi**

Jeneponto SMART 2023 Berdaya Saing, Maju, Relegius, dan Berkelanjutan.

**2) Misi**

- a) Mengakselerasi perbaikan indeks pembangunan manusia.
- b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- c) Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola pemerintah yang professional, aspiratif, partisipatif, dan transparan.
- d) Melaksanakan pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur wilayah secara merata.

- e) Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya daerah dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan investasi yang berkeadilan.
- f) Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan, dan akuntabel.
- g) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan nilai-nilai budaya.
- h) Menegakkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban.

### c. Kependudukan

Penduduk sebagai objek sekaligus subjek pembangunan merupakan aspek utama yang mempunyai peran penting dalam pembangunan. Laju pertumbuhan penduduk merupakan barometer untuk menghitung besarnya semua kebutuhan, yang diperlukan masyarakat, seperti perumahan, sandang, pangan, pendidikan dan sarana penunjang lainnya. Berikut jumlah penduduk di Kabupaten Jeneponto berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto.

Tabel. 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Jeneponto

Kode	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Total
		L	P	
1	2	3	4	5
010	BANGKALA	26,868	28,096	54,964
011	BANGKALA BARAT	14,406	14,632	29,038
020	TAMALATEA	20,409	21,731	42,140
021	BONTORAMBA	17,497	19,033	36,530
030	BINAMU	27,727	29,295	57,022
031	TURATEA	15,747	16,799	32,546

040	BATANG	9,124	10,414	19,538
041	ARUNGKEKE	8,796	9,762	18,558
042	TAROWANG	10,909	11,824	22,733
050	KELARA	12,897	14,430	27,327
051	RUMBIA	11,227	12,169	23,396
	JUMLAH	175,607	188,185	369,792

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto

## **2. Profil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jeneponto**

### **a. Kedudukan dan Latar Belakang**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan perangkat daerah Kabupaten Jeneponto bertempat di jalan Lanto dg Pasewang No. 34 yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah No.4 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja teknis daerah Kabupaten Jeneponto, serta memiliki kewenangan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

### **b. Visi Misi Bappeda Kabupaten Jeneponto**

#### **1. Visi**

Mewujudkan pemerintahan yang baik dan penguatan daya saing daerah menuju masyarakat jeneponto yang sejahtera.

#### **2. Misi**

- a) Membangun tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.
- b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).



- c) Membangun kemandirian ekonomi masyarakat yang bertumpu pada potensi lokal.
- d) Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan, dan akuntabel.
- e) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.

### **c. Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian**

Berdasarkan peraturan Bupati Jeneponto No 27 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jeneponto, memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Jeneponto dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina, meneliti, mendokumentasikan dan menyusun dokumen perencanaan pembangunan meliputi:
  - a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
  - b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
  - c) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
  - d) Rencana strategis (Renstra) dan dokumen lainnya serta mengevaluasi kebijakan tahunan dan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah.
- 2) Dalam melakukan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda) menyelenggarakan fungsi:
  - a) Merumuskan kebijakan umum perencanaan dan penganggaran daerah.

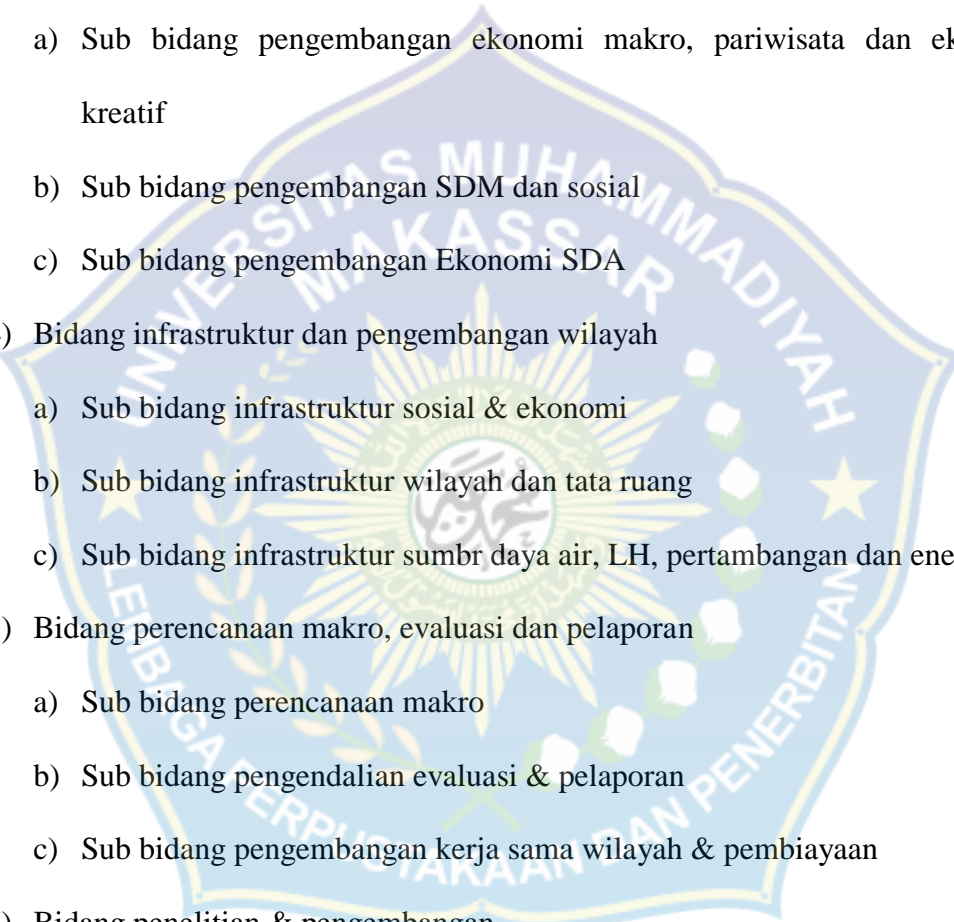
- b) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan program/kegiatan dan penganggaran lintas sector.
  - c) Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
  - d) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah.
  - e) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang dan kesekretariatan badan.
  - f) Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Rincian tugas pokok yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- a) Mengkoordinasikan penyusunan kerja dibidang perencanaan pembangunan.
  - b) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.
  - c) Mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan serta kegiatan perencanaan pembangunan dibidang sosial ekonomi, fisik, dan prasarana.
  - d) Mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah agar hasil yang dicapai sesuai sasaran yang telah ditentukan.
  - e) Merumuskan kebijakan tahunan dan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah.
  - f) Mengkoordinasikan rancangan kebijakan belanja pembangunan dengan para pimpinan unit kerja dalam rangka penyusunan APBD.

- g) Mengkoordinasikan rancangan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
- h) Menyiapkan dan mempelajari naskah peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainya yang relevan untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- i) Membagi tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- j) Memimpin, memantau, dan mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan.
- k) Membina, menilai staf dalam lingkup Bappeda dalam rangka peningkatan kemampuan dan disiplin kerja sebagai bahan pembinaan karier.
- l) Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan dan perlengkapan/peralatan badan.
- m) Mengoreksi dan menandatangani naskah dinas.
- n) Memberi pertimbangan kepada bupati untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- o) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas.
- p) Melaksanakan tugas kedinasan lainyang diperintahkan oleh atasan.

**d. Susunan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto.**

Susunan struktur organisasi badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto:

- 1) Kepala Badan

- 
- 2) Sekretariat Badan
    - a) Sub bagian umum & kepegawaian
    - b) Sub bagian perencanaan
    - c) Sub bagian keuangan
  - 3) Bidang sosial & ekonomi
    - a) Sub bidang pengembangan ekonomi makro, pariwisata dan ekonomi kreatif
    - b) Sub bidang pengembangan SDM dan sosial
    - c) Sub bidang pengembangan Ekonomi SDA
  - 4) Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah
    - a) Sub bidang infrastruktur sosial & ekonomi
    - b) Sub bidang infrastruktur wilayah dan tata ruang
    - c) Sub bidang infrastruktur sumber daya air, LH, pertambangan dan energi
  - 5) Bidang perencanaan makro, evaluasi dan pelaporan
    - a) Sub bidang perencanaan makro
    - b) Sub bidang pengendalian evaluasi & pelaporan
    - c) Sub bidang pengembangan kerja sama wilayah & pembiayaan
  - 6) Bidang penelitian & pengembangan
    - a) Sub bidang penelitian, pengembangan ekonomi dan SDA
    - b) Sub bidang penelitian pengembangan inovasi dan teknologi
    - c) Sub bidang penelitian pengembangan pembangunan SDM dan pemerintahan

### **3. Proses perumusan program dan kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jeneponto.**

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan agar masing-masing daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

#### **a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto tersusun dalam peraturan daerah No 3 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jeneponto. Dimana RPJPD adalah landasan umum perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jeneponto untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jenepono jangka panjang yang berintegrasi dengan rencana pembangunan nasional jangka panjang. RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

##### **1) Penyiapan rancangan RPJPD**

Penyiapan rancangan RPJPD untuk mendapatkan gambaran awal dari visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang merupakan tanggung jawab kepala Bappeda dan selanjutnya menjadi bahan bahasan dalam Musrebang Jangka Panjang Daerah.



## 2) Musrembang Jangka Panjang Daerah

Musyawarah perencanaan pembangunan merupakan forum antar pelaku untuk membahas rancangan visi, misi, dan arah pembangunan dan mendapatkan komitmen antara pelaku pembangunan yang menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJP Daerah.

## 3) Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD

Penyusunan rancangan akhir RPJPD merupakan tanggung jawab kepala Bappeda, dengan bahan masukan utama hasil keepakatan musrembang jangka panjang daerah. Rancangan daerah ini disampaikan kepada kepala daerah, dan selanjutnya diproses untuk ditetapkan dalam peraturan daerah.

## 4) Penetapan Peraturan Daerah Tentang RPJPD

Rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, terlebih dahulu dikonsultasikan kepada gubernur sebelum ditetapkan.

### b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang daerah. Penyusuna RPJMD untuk periode 5 tahun sesuai dengan masa jabatan kepala daerah. RPJMD Kabupaten Jeneponto tertuang dalam Peraturan Daerah No 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berisikan gambaran umum kondisi daerah, gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, analisis isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan

arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan, pedoman, penetapan indikator kinerja daerah dan pedoman transisi serta kaidah pelaksanaan. RPJMD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyiapan Rancangan Awal RPJMD
  - 2) Penyiapan Rancangan Renstra-SKPD
  - 3) Penyusunan rancangan RPJMD
  - 4) Musrembang jangka menengah daerah
  - 5) Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD
  - 6) Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD
- c. Penyusunan Rencana Strategis bappeda Kabupaten Jeneponto

Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra-SKPD) merupakan dokumen rencana pembangunan dari masing-masing SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dalam jangka 5 tahun dengan berpedoman pada peraturan daerah No 2 Tahun 2009 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD). Penyusuna Renstra Bappeda sebagai SKPD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Jeneponto dengan memperhatikan gambaran pelayanan pokok, isu strategis, tujuan, visi, misi, saran strategi dan kebijakan.

Renstra-SKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyiapan rancangan Renstra-SKPD
- 2) Penyusuna rancangan akhir Renstra-SKPD
- 3) Penetapan peraturan kepala SKPD tentang Renstra-SKPD

d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Jeneponto disusun setiap tahunnya yang bersifat rinci dan operasional yang mengacu Peraturan Daerah No 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). RKPD berisikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang selanjutnya dijadikan pula sebagai dasar utama dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan yang sangat praktis karena isinya lebih banyak diarahkan pada perumusan program dan kegiatan secara rinci lengkap dengan indikator dan target kinerjanya untuk masing-masing program dan kegiatan. Disamping itu RKPD juga memuat tentang perkiraan kebutuhan anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan berikut unit atau bagian yang akan mengerjakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya.

Penyusunan RKPD dilakukan setiap tahun agar dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi, kebijakan pemerintah dan kemampuan anggaran pada tahun berangkutan. Dimulai dengan penyiapan rancangan awal oleh Bappeda dengan menjabarkan RPJMD dengan memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mendesak. Dengan pertimbangan hal tersebut diatas dan dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah serta ketersediaan dana pada tahun perencanaan, maka dirumuskanlah prioritas-

prioritas pembangunan untuk tahun perencanaan. RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a) Penyiapan Rancangan awal RKPD

RKPD merupakan penjabaran RPJMD dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah. RKPD berisi program kerja dan pagu indikatif (fungsi, wilayah kerja).

b) Penyiapan rancangan Renja-SKPD

Penyiapan Renja SKPD merupakan tanggung jawab kepala SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah serta yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

c) Musrembang Tahunan Daerah

Pelaksanaan musrembang daerah melibatkan seluruh pelaku pembangunan dengan 3 tahapan musrembang:

- 1) Musrembang ditingkat desa dan kelurahan.
- 2) Musrembang ditingkat kecamatan.
- 3) Musrembang ditingkat kabupaten/kota

d) Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan Rancangan RKPD memperhatikan hasil musrembang tahunan, rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, program dan pagu indikatif, kegiatan pokok dan unit pelaksanaan.

e) Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Penyusunan rancangan akhir RKPD merupakan tanggung jawab kepala Bappeda dengan masukan utama hasil kesepakatan musrembang tahunan daerah untuk disampaikan kepada kepala daerah, dan selanjutnya diproses untuk ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

f) Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD.

## **B. Hasil Penelitian**

Berikut akan membahas tentang hasil dari penelitian yang memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Jeneponto.

### 1. *Quantity of work* (kuantitas kerja)

Kuantitas kerja merupakan jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang ditentukan. Dalam hal ini jumlah program kerja yang mampu diselesaikan atau dikerjakan sesuai waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Kelurahan Sidenre, menyatakan bahwa:

“Kami masih belum melihat hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, usulan program yang kelurahan usulkan belum ada yang terealisasikan dalam bentuk pembangunan yang nyata. Salah satu usulan program prioritas dari kelurahan itu adalah drainase karna dikelurahan sidenre dataran rendah sedangkan kelurahan tetangga dataran tinggi sehingga ketika hujan yang menjadi pembuangan air adalah kelurahan sidenre sehingga kapan hujan kelurahan sidenre banjir. Walaupun jadi program prioritas tapi tidak ada diprogramnya SKPD kita kasih turun dan kita kasih naik yang diprogramkan SKPD, karna percumaji walaupun kita jadikan skala prioritas pertama kedua kalau dia tidak diprogramkan di SKPD samaji tidak akan dikerjakanji juga. Makanya itu dimusrembang



kelurahan itu ada perubahan sedikit memang haruspi sinkron dan bersinergi dari SKPD”. (Wawancara dengan RA 29 Juli 2019).

Adapun pendapat yang sama yang diungkapkan oleh salah satu LSM Pattiro Jeka yang mengatakan Bahwa:

“Mengenai kuantitas pembangunan yang dihasilkan oleh pemerintah sudah ada perkembangan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kita berharap supaya pemerintah kabupaten jenepono terutama Bappeda salah satu instansi pemerintah yang menjadi ujung tombak dalam proses pembangunan agar memerhatikan di wilayah mana yang betul-betul memerlukan pembangunan itu”. (Wawancara dengan AS 25 Juli 2019)

Dari hasil wawancara kedua informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah harus melihat wilayah mana yang betul-betul memerlukan pembangunan itu dengan melihat secara langsung kondisi lingkungan tersebut.

Adapun pendapat yang disampaikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda, menyatakan bahwa:

“Mengenai kuantitas pembangunan yang ada di kabupaten jenepono itu kita berlandaskan pada rencana kerja, Bappeda itu berpedoman pada rencana kerja, mulai dari jangka pendek, menengah, dan panjang. Setiap rencana kerja itu mempunyai periode tertentu. Jadi kita tidak semerta-merta melakukan pembangunan begitu saja tanpa ada pertimbangan terlebih dahulu. (Wawancara FS 05 Agustus 2019).

Hal yang sama yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda, mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pembangunan itu sudah ada target untuk diselesaikan, diwaktu perencanaan sudah ditetapkan kapan pembangunan akan dilakukan dan kapan selesai pembangunan itu. Mengenai banyaknya pembangunan yang dilaksanakan tidak terlepas dari program kerja pemerintah baik itu dari SKPD terkait dan kemampuan anggaran APBD Jeneponto untuk membiayai semua usulan dari Masyarakat. Kalau semua usulan masyarakat mau dilaksanakan ndik tenggelam jenepono untuk memenuhi usulan masyarakat, APBD Jeneponto sekitar 1,2 Trilliun itupun sudah termasuk pembayaran gaji PNS. Keterlibatan masyarakat itu pada saat proses musrembang tingkat desa atau kelurahan, Prosesnya begini ndik mulai dari musrembang tingkat desa atau kelurahan itu melibatkan

masyarakat. Di desa itu ada namanya musrembang dusun sebelum melaksanakan musrembang desa begitupun di kelurahan. Setelah ditetapkan musrembang desa ada delegasi dari desa sebanyak 5 orang sebagai orang yang dipercayakan mengawal usulanya, sampai kecamatan semua delegasi berkumpul jadi umpamanya 10 desa jadi 50 orang delegasi yang mau mengusulkan musyawarah di kecamatan, jadi nanti ditunjuk lagi 5 orang delegasi dari kecamatan untuk naik lagi di Kabupaten. Setelah ini sampai disini ada namanya forum SKPD musrembang kabupaten dia ketemu langsung sama SKPD”. (Wawancara dengan MM 05 Agustus 2019).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa usulan program dari masyarakat harus dipertimbangkan oleh pemerintah karena melihat dari usulan tersebut. Usulan yang direalisasikan oleh pemerintah yaitu usulan yang menjadi prioritas yang sudah menjadi pertimbangan terlebih dahulu dan kesanggupan anggaran APBD Kabupaten Jeneponto. Dapat kita lihat bagan usulan program kerja dari hasil musrembang Kelurahan Sidenre dibawah ini.

Tabel. 4.2 Daftar Prioritas Usulan Kegiatan Hasil Musrembang Kelurahan Sidenre Tahun 2018

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi	SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4	5
1	Pembuatan Drainase	Mengantisipasi genangan air dan banjir	Empat Lingkungan	Dinas PU Jeneponto
2	Pembuatan Bronjong	Rumah dan kebun warga terhindar dari longsor yang disebabkan oleh abrasi yang terjadi setiap musim hujan	Lingkungan Sidenre dengan lingkungan Bosalia	Dinas PU Kab. Jeneponto diteruskan ke PUsat balai Pompengan di Kab. Gowa
3	Pembangunan pagar kelurahan	Meningkatkan kualitas dan pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar, pelayanan umum, perekonomian dan sosial budaya	Lingkungan Sidenre	Dinas PU Jeneponto
4	Pengaspalan Hotmiks	Melancarkan arus lalu lintas dan terhindar dari	Lingkungan Sidenre ke	Dinas PU Jeneponto

		kecelakaan	lingkungan Kunjung mange timur	
5	Pembuatan sumur bor	Mengoptimalkan penataan ruang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Lingkungan Sidenre	Dinas PU Jenepono
6	Peningkatan kualitas / rehab rumah	Warga yang memiliki rumah tidak layak huni	Empat lingkungan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Jenepono
7	Pelebaran dan peningkatan jalan	Meningkatkan kualitas dan pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar, pelayanan umum, perekonomian dan sosial budaya	Ling. Sidenre ke lingkungan Bosalia ke lingkungan Kunjung mange barat	Dinas PU Jenepono
8	Pembuatan saluran irigasi (Tersier)	Melancarkan suplai air ke lahan pertanian	Lingkungan Sidenre	Dinas PU Jenepono
9	Pembuatan jalan setapak	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah, perekonomian dan sosial budaya	Lingkungan Sidenre dan lingkungan Kunjung mange barat	Dinas PU Jenepono
10	Pengadaan mobil pick-up	Mobilisasi angkutan hasil petani	Empat lingkungan	Dinas Perhubungan Kab. Jenepono
11	Pembuatan pagar kuburan	Meningkatkan kualitas dan pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar, pelayanan umum, perekonomian dan sosial budaya	Lingkungan Bosalia	Dinas Pendidikan dan Cagar Budaya Kab. Jenepono
12	Pembuatan pagar pustu	Meningkatkan kualitas dan pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar, pelayanan umum, perekonomian dan sosial budaya	Lingkungan Bosalia	Dinas Kesehatan Kab. Jenepono
13	Pengadaan alat penangkapan ikan	Meningkatkan kesejahteraan hidup para nelayan	Lingkungan Kunjung mange barat dan lingkungan	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Jenepono

			Bosalia	
14	Pembangunan posyandu	Penunjang pelaksanaan program kesehatan untuk masyarakat	Empat lingkungan	Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto
15	Pembuatan embung	Meningkatkan taraf ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat	Lingkungan sidenre	Dinas PU, Dinas Pertanian, dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jeneponto
16	Penambahan fasilitas pustu (Alkes)	Meningkatkan kualitas dan pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar, pelayanan umum, perekonomian dan sosial budaya	Lingkungan Bosalia	Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto
17	Bantuan Perahu	Petani rumput laut	Empat lingkungan	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Jeneponto
18	Bantuan bibit rumput laut & tali	Petani rumput laut	Empat lingkungan	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Jeneponto
19	Bantuan bibit jagung, padi, dan pupuk	Kelompok tani	Empat lingkungan	Dinas Pertanian Kab. Jeneponto
20	Pengadaan Alsintan (Hand Tractor)	Mempercepat dan memudahkan pengolahan lahan pertanian	Empat lingkungan	Dinas Pertanian Kab. Jeneponto
21	Pengadaan pompa air	Mempercepat dan memudahkan pengolahan pertanian	Empat lingkungan	Dinas Pertanian Kab. Jeneponto
22	Pemasangan paving blok untuk jalan setapak	Melancarkan arus lalu lalang dan keindahan lingkungan	Lingkungan Sidenre (kampung pa'bundukang)	Dinas PU Kab. Jeneponto
23	Pemasangan paving blok	Melancarkan arus lalu lalang dan keindahan lingkungan	Lingkungan Sidenre (kampung pa'bundukang)	Dinas PU Kab. Jeneponto
24	Pemasangan paving blok untuk jalan usaha tani	Melancarkan arus kendaraan bagi petani	Lingkungan Sidenre (kampung pa'bundukang)	Dinas PU Kab. Jeneponto
25	Bantuan peralatan menjahit	Peningkatan ekonomi kelompok wirausaha	Empat lingkungan	Dinas Sosial Kab. Jeneponto
26	Pelatihan SDM bagi masyarakat	Memiliki keterampilan dan SDM	Empat lingkungan	Dinas Sosial, Dinas



	(pelatihan tata boga, tat arias, fotografer, kursus menjahit dll)			Pariwisata, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jeneponto
27	Maudu' lompoa	Melestarikan budaya kearifan local dan sebagai obyek wisata	Lingkungan Sidenre	Dinas Pariwisata Kab. Jeneponto
28	Pengadaan ternak (kuda, kambing, sapi, dan kerbau)	Meningkatkan taraf ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat	Empat lingkungan	Dinas Pertanian Kab. Jeneponto
29	Pembuatan drainase dalam kawasan perumahan	Meningkatkan kualitas dan pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar, pelayanan umum, perekonomian dan sosial budaya	Lingkungan Sidenre dan lingkungan Kunjung mange timur	Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan Kab. Jeneponto
30	Peningkatan kawasan kumuh	Meningkatkan kualitas dan pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar, pelayanan umum, perekonomian dan sosial budaya	Empat lingkungan	Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan Kab. Jeneponto
31	Pemberian / peningkatan insentif bagi kader posyandu	Kesejahteraan kader posyandu	Empat lingkungan	Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto
32	Bantuan peralatan perbengkelan	Peningkatan ekonomi kelompok wirausaha	Empat lingkungan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jeneponto
33	Bantuan peralatan pertukangan (meubel)	Peningkatan ekonomi kelompok wirausaha	Empat lingkungan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jeneponto
34	Pelatihan UKM	Masyarakat memiliki kemampuan dalam mengelola usaha	Empat lingkungan	Dinas Sosial Kab. Jeneponto
35	Pemberian insentif bagi imam mesjid	Peningkatan kesejahteraan imam mesjid	Empat lingkungan	Bagian Kesra Kab. Jeneponto
36	Pemberian insentif bagi guru mengaji	TPA/TPQ	Empat lingkungan	Bagian Kesra Kab. Jeneponto
37	Bantuan kitab	TPA/TPQ	Empat	Bagian Kesra



	Al-Quran dan buku iqra		lingkungan	Kab. Jeneponto
38	Bantuan modal koperasi	Masyarakat tidak lagi meminjam kepada rentenir	Empat lingkungan	Dinas Koperasi Kab. Jeneponto
39	Pembangunan gedung PAUD dan pengadaan fasilitas penunjang	Meningkatkan kualitas dan pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar, pelayanan umum, perekonomian dan sosial budaya	Lingkungan Kunjung mange barat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Jeneponto
40	Pemberian insentif bagi tendik PAUD	Meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga pengajar PAUD	Lingkungan Sidenre	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Jeneponto
41	Pembangunan pagar SD Sidenre	Meningkatkan kualitas dan pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar, pelayanan umum, perekonomian dan sosial budaya		Dinas PU & Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Jeneponto
42	Pembangunan sarana obyek wisata sungai	Pendapatan asset daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat kelurahan sidenre	Lingkungan sidenre	Dinas Pariwisata Kab. Jeneponto

## 2. *Quality of work* (kualitas pekerjaan)

Kualitas pekerjaan yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya. Dalam hal ini sejauh mana Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan kualitas dari hasil kerja serta peningkatan kualitas kerja. Seperti yang dikatakan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Sidenre, mengatakan bahwa:

“pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah jika kita lihat dari kualitasnya itu belum baik, seperti pembangunan bendungan sungai yang mulai dari jembatan Belokkallong sampai dengan ke Lingkungan sidenre itu sudah retak padahal baru dua bulan bendungan itu selesai ”. (Wawancara dengan BM 25 Juli 2019)

Hal ini senada apa yang disampaikan oleh salah satu LSM Pattiro Jeka yang mengatakan Bahwa:

“Begini dek, kualitas dari pembangunan itu kita lihat dari material yang digunakan pada saat pembangunan itu berjalan. Jika material yang digunakan itu tahan lama pasti hasil dari pembangunan itupun akan tahan lama begitupun sebaliknya dek”. (Wawancara dengan AS 25 Juli 2019)

Hal ini juga disampaikan juga oleh Kepala Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi dan Pelaporan, mengatakan bahwa:

“Kami selalu berusaha memperhatikan kualitas pembangunan ndik, kualitas pembangunan diawasi bersama-sama, selain itu diperlukan peran masyarakat untuk mengawal kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Jeneponto. Kami selalu mengupayakan untuk meningkatkan kualitas pembangunan dengan cara pengawasan ketat oleh tim pelaksana kegiatan pembangunan sehingga akan bermanfaat bagi masyarakat”.(Wawancara dengan MM 05 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah telah mengupayakan meningkatkan kualitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan memberikan pengawasan ketat dari tim pelaksana kegiatan dan perlu juga keterlibatan masyarakat dalam mengawal kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Jeneponto. Selanjutnya tanggapan yang diungkapkan oleh informan ST selaku Kepala Lingkungan Bosalia mengatakan bahwa:

“kualitas pembangunan yang dilakukan pemerintah itu kurang maksimal karna sebagai contoh pembangunan jembatan di Lingkungan bosalia itu sudah retak, belum selesai saja sudah retak apalagi pembngunan jembatan itu sudah mangkrak”. (Wawancara ST 20 Juli 2019)

Selanjutnya tanggapan yang sama diungkapkan oleh informan RA selaku Kepala Kelurahan Sidenre, mengatakan bahwa:

“mengenai kualitas pembangunan itu tergantung dari bahan yang digunakan, seperti pembangunan jembatan di Kelurahan Sidenre yang ada di Lingkungan Bosalia itu sudah ada yang runtuh padahal jembatan ini belum selesai dibangun sampai sekarang. Wajar saja jembatan itu runtuh karna material yang dipakai itu tidak berkualitas ditambah lagi dengan derasnya air sungai ketika Kabupaten Jeneponto dilanda banjir”. (Wawancara dengan RA 29 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara kedua informan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk menghasilkan pembangun yang berkualitas dapat didukung dengan material yang digunakan didalam pembangunan tersebut, semakin berkualitas material yang digunakan semakin berkualitas pun pembangunan tersebut. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, penulis meninjau pembangunan jembatan yang ada di Lingkungan Bosalia dengan hasil tinjauan memang benar adanya puing-puing jembatan yang runtuh dan banyaknya rumput yang tumbuh di jembatan tersebut.

### 3. *Job knowledge* (pengetahuan kerja)

Luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya. Dalam hal ini sejauh mana dapat mengetahui tugasnya atau pekerjaan yang dilakukan dan keterampilannya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Lingkungan Bosalia yang mengatakan bahwa:

“Saya rasa semua pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sudah direncanakan dengan baik sesuai dengan pengetahuan yang dia miliki”. (Wawancara dengan ST 20 Juli 2019)

Selanjutnya diperkuat lagi dari tanggapan informan AS selaku LSM Pattiro Jeka mengatakan bahwa :

“Dalam pembangunan sudah pasti yang terlibat adalah isi kepala dari pemerintah. Tetapi terkadang pemerintah memberikan sasaran

pembangunan kepada wilayah yang tidak membutuhkan pembangunan tersebut. Seperti halnya yang ada di Lingkungan Kunjung Mange yang menjadi sasaran pembangunan IPAL padahal kalau diamati dengan baik IPAL ini cocoknya wilayah yang kekurangan air karena IPAL ini adalah pengelolaan air limbah masyarakat”. (Wawancara dengan AS 25 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh pemerintah, akan tetapi perlu sasaran tepat dalam merealisasikan pembangunan tersebut.

Tanggapan diatas diperkuat dengan informan RA selaku Kepala Kelurahan Sidenre mengatakan bahwa :

“itu sudah pasti dek, setiap yang dilaksanakan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki, semua orang mempunyai pengetahuan yang berbeda dan melahirkan skil yang berbeda pula. Sama halnya dengan saya dek saya mengusulkan suatu program pembangunan karena melihat kondisi lingkungan yang ada”. (Wawancara dengan RA 29 Juli 2019)

Tanggapan yang senada dari salah satu informan MM Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda mengatakan bahwa:

“semua perencanaan pembangunan bersumber dari pikiran dari pemerintah, didalam perencanaan pembangunan dibutuhkan suatu pengetahuan yang dapat memecahkan suatu masalah. Sehingga dengan adanya pengetahuan yang berbeda dapat disatukan dan menemukan solusi dari masalah tersebut. Kita tidak semerta-merta melaksanakan pembangunan tersebut tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu”. (Wawancara dengan MM 05 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah sudah melewati tahap perencanaan yang dilakukan oleh segelintir orang dalam memecahkan sebuah permasalahan yang ada di Kabupaten Jeneponto. Perencanaan pembangunan yang didasari dengan pengetahuan yang dimiliki serta

pengalaman yang mumpuni dapat menghasilkan perencanaan yang matang sehingga hasil dari perencanaan itu akan memuaskan.

#### 4. *Creativeness* (kreativitas)

Kreativitas merupakan gagasan-gagasan yang dimunculkan dari tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul. Dalam hal ini dapat menyampaikan atau mengeluarkan ide-ide dan gagasannya untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada. Seperti yang diungkapkan salah satu informan AS selaku LSM Pattiro Jeka yang mengatakan bahwa:

“Didalam hal apapun kreativitas sangat diperlukan sebab menjadi kunci utama didalam sebuah masalah yang dihadapi. Olehnya itu pemerintah harus mempunyai gagasan-gagasan yang berkualitas sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang baru.”. (Wawancara dengan AS 25 Juli 2019)

Selanjutnya tanggapan yang sama dari informan BM selaku tokoh masyarakat Kelurahan Sidenre, mengatakan bahwa :

“Pemerintah sudah memberikan kita ruang dimana kita bisa memberikan gagasan-gagasan ketika musrembang dilaksanakan. Pihak Kelurahan sidenre melibatkan masyarakatnya dalam rapat kelurahan hanya untuk mendengar gagasan-gagasan yang dimiliki masyarakatnya dalam bersama-sama membangun wilayahnya”. (Wawancara dengan BM 25 Juli 2019)

Gagasan-gagasan, ide, maupun saran dan kritikan yang diberikan masyarakat terhadap pemerintah sangat diperlukan sehingga gagasan itu menjadi acuan untuk dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya. Banyak yang menganggap kritikan itu adalah cemoan yang diberikan sehingga banyak yang menyepelkan kritikan yang diberikan kepadanya. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan AJ selaku masyarakat Kelurahan Sidenre mengatakan bahwa:

“Saya juga biasa menyarankan untuk diperbaiki itu jalanan agar tidak ada lagi kecelakaan, baru-baru ini ada orang yang kecelakaan gara-gara sama-



sama menghindari jalanan yang berlubang, sampai-sampai dilarikan kerumah sakit karna jari kakinya hampir putus”. (Wawancara dengan AJ 20 Juli 2019)

Tanggapan yang sama juga dikatakan oleh informan ST selaku Kepala Lingkungan Bosalia, mengatakan bahwa :

“Sering sekali dikritik itu pak lurah tapi pak lurah menerima kritikan dan saran itu. Saya juga tidak tahu apakah kritikan itu dibenahi atau dia menerima saja tanpa memperbaiki yang sebelumnya. Karna kadang kita berikan saran lambat baru ada tindak lanjutnya apa yang kita berikan”. (Wawancara dengan ST 20 Agustus)

Selanjutnya tanggapan yang diungkapkan oleh informan RA selaku Kepala Kelurahan mengatakan bahwa:

“Saya terima semua kritikan dan saran yang diberikan baik dari kepala lingkungan maupun dari semua masyarakat. Saya mempunyai alasan mengapa sampai sekarang masyarakat mempertanyakan pengadaan tempat sampah maupun perbaikan jalan. Sebenarnya jika kita mau buat tempat sampah satu hari sudah jadi itu tempat sampah tapi yang jadi masalahnya itu tidak ada yang mau angkut itu sampah. Kita liat yang dulu-dulunya pernah ada tempat sampah dikelurahan Sidenre sebelum saya ditetapkan untuk menjabat kepala kelurahan di Sidenre kenapa saya tahu karna saya sering lewat disini kalau pergi mancing. Mengenai pengangkutan saya sudah ke Dinas Tata Ruang saya rekomendasikan agar sampah yang ada di Kelurahan Sidenre itu di angkut tapi sampai sekarang belum ada respon dari Tata Ruang. Jadi kendalanya siapa yang mau angkut kalau sudah penuh, kalau tidak ada yang angkut bakal busuk disitu tambah kotor lagi. Kita ambil contoh di Makassar, di Makassar setiap lorong hampir tidak ada tempat sampahnya warga disana cuma nasip saja dipagarnya baru ada tukang sampah yang datang ambil. Ambil contoh maki saja disitu tidak adaji juga tempat sampahnya tapi dia jelas ada yang angkut sampahnya, kita disini persoalan siapa yang mau angkut. Mengenai perbaikan jalan itu itu adalah tugasnya kabupaten, bukan kelurahan. Yang bisa dibiayai kelurahan itu jalanan kelurahan saja seperti jalan setapak yang ada di Lingkungan”. (Wawancara dengan RA 29 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kritikan yang diberikan oleh masyarakat itu sifatnya membangun sehingga pemerintah dapat memperbaiki hal-hal sebelumnya. Langkah yang diambil oleh

kepala kelurahan sudah ada akan tetapi masih banyak kendala yang dihadapinya seperti belum ada respon baik dari Dinas Tata Ruang mengenai pengangkutan sampah di Kelurahan Sidenre. Kritik dan saran menjadikan kita sebagai modal untuk merubah yang lebih baik lagi. Dengan banyaknya kritikan yang diberikan, kita dengan mudah dapat mengetahui kesalahan yang kita perbuat dan jadikan kritikan itu adalah sebuah motivasi yang membangun akhlak maupun kepribadian kita.

#### 5. *Cooperation* (kerjasama)

Kerjasama merupakan ketersediaan untuk bekerja sama dengan orang lain. Dalam hal ini dalam melaksanakan suatu pekerjaan perlu adanya ketersediaan bekerjasama agar lebih mempermudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti tanggapan yang dikemukakan oleh informan FS selaku Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda mengatakan bahwa:

“Bentuk kerja sama pemerintah dengan masyarakat disini yaitu kami sebagai fasilitator pembangunan dengan melibatkan masyarakat dalam hal perencanaan program yang diusulkan, dan kami memberikan masyarakat untuk terlibat didalam pembangunan tersebut”. (Wawancara dengan FS 05 Agustus 2019)

Selanjutnya tanggapan dari informan AH selaku staf Kelurahan Sidenre mengatakan bahwa :

“Pihak pemerintah cukup antusias dalam hal memberikan sedikit tanggung jawab kepada masyarakat seperti halnya waktu adanya dinas Perikanan dan Kelautan untuk melakukan pendataan jumlah petani rumput laut serta mengenai kondisi usahanya bagaimana, pemerintah memberikan tanggungan itu kepada salah satu masyarakat yang mempunyai pengaruh yang tinggi kepada masyarakat lainnya. (Wawancara dengan AH 29 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pihak pemerintah telah bekerja sama dengan masyarakat dalam hal pembangunan dengan ikut terlibatnya masyarakat dalam pelaksanaan program perangkat daerah Kabupaten Jeneponto. Selanjutnya tanggapan yang sama dengan informan BM selaku Tokoh Masyarakat Kelurahan Sidenre mengatakan bahwa:

“Iya ndik, ada memang biasa yang uruski pak lurah yang kasihki itu. Kalau ada pengurusan pasti kerumahnyaki itu, baru-baru ini pengurusan sertifikat tanah semua pegawainya ada dirumahnya, disanaki semua kumpul berkas”. (Wawancara dengan BM 25 Juli 2019)

Hasil wawancara diatas senada dengan informan ST selaku Kepala Kelurahan Bosalia mengatakan bahwa:

“Ada memang masyarakat yang diberikan kepercayaan oleh pak lurah, dan memang orang yang diberikan kepercayaan itu mempunyai pengaruh besar dilingkungan sidenre”. (Wawancara dengan ST 20 Juli 2019)

Tanggapan diatas diperkuat salah satu informan RA selaku Kepala Kelurahan Sidenre yang mengatakan bahwa :

“Memang benar saya berikan kepada salah satu masyarakat karna tingkat pengaruhnya cukup besar terhadap masyarakat lainnya. Orang yang saya libatkan dalam pekerjaan itu orang yang mempunyai tingkat pengaruh yang tinggi, tidak mungkin saya memberikan kepada salah satu masyarakat yang tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Masa kita kasihki yang tidak ada pengaruhnya sama sekali yakin saja bakalan tidak selesai ini pekerjaan walaupun selesai pasti lama nakerja”. (Wawancara dengan RA 29 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kerja sama antara pihak kelurahan dengan masyarakat cukup baik karena pihak kelurahan memberikan sedikit tanggung jawab kepada orang yang diberikan kepercayaan akan hal pekerjaan itu mempunyai tingkat pengaruh yang tinggi terhadap masyarakat setempat. Orang yang mempunyai tingkat

pengaruh yang tinggi akan lebih mudah dalam hal apapun sehingga memudahkan suatu pekerjaan. Kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat sangat diperlukan karena masyarakat dapat terlibat langsung dalam pembangunan dan sebagai pelaksana didalam pembangunan tersebut.

#### 6. *Dependability* (keteguhan)

Keteguhan merupakan kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan penyelesaian kerja dengan tepat waktunya. Dalam hal ini dalam melaksanakan tugas perlu adanya keteguhan, selain itu kehadiran sangat penting dipatuhi agar supaya pelaksanaan tugas dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang ditentukan sebelumnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Kepala Kelurahan Sidenre yang mengatakan bahwa:

“Awal dilaksanakannya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ada yang mengawal pelaksanaan tersebut tetapi pengawalan yang dilakukan itu hanya sebentar saja. Dia datang untuk melihat pembangunan itu dilaksanakan dan beberapa menit sudah tidak ada lagi pengawas, dan hanya sampai disitu pengawasan yang dilakukan tanpa adanya evaluasi dari pemerintah.”. (Wawancara dengan RA 29 Juli 2019)

Selanjutnya tanggapan yang sama dari informan AJ salah satu masyarakat Kelurahan Sidenre, mengatakan bahwa :

Saya datang ketika acara musrembang dilaksanakan, saya di undang oleh kelurahan untuk mengikuti musrembang yang dilaksanakan di kantor Kelurahan. (Wawancara dengan AJ 20 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara kedua informan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa perlu adanya keteguhan pemerintah didalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat di kelurahan sidenre dengan penuh antusias untuk mengikuti acara musrembang yang diadakan oleh pemerintah. Adapun tanggapan



yang sama yang diungkapkan oleh Kepala Kelurahan Sidenre yang mengatakan bahwa :

“Sudah jelas kami mengundang seluruh masyarakat baik itu dari tokoh masyarakat, kepala lingkungan, pemuka agama, dan LSM. Mereka dilibatkan dalam musrembang untuk memberikan usulan program yang akan dianggarkan oleh pemerintah untuk pembangunan yang akan datang. Kami staf kelurahan sudah maksimalkan agar masyarakat dapat memahami arti dari pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan materi yang didapatkannya sewaktu musrembang”. (Wawancara dengan RA 29 Juli 2019)

Tanggapan diatas diperkuat oleh salah satu informan FS selaku Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda, mengatakan bahwa:

“Selain dari tanggung jawab yang dimiliki sudah pasti kami mempunyai keteguhan dalam melaksanakan semua yang menjadi rencana pembangunan. Kami selalu mengenterview perangkat daerah mengenai program yang dijalankannya, tetapi disini terkadang SKPD tidak hadir pada saat musrembang berlangsung, seharusnya SKPD hadir pada saat diundang agar dia sampaikan program kerja yang akan dianggarkan tahun depan. Contoh PU seharusnya turun pada saat musrembang pada saat diundang supaya masyarakat tidak berharap-harapmi, Bappeda itu cuma memfasilitasi proses SKPD yang harus turun. Misalnya tahun 2020 ada drainase sekian kilo mau dibangun mengusukan maki semua itu dia kasih kumpulmi yang mana prioritas, itu namanya musrembang. Ini SKPD bingung apa mau nabeli, harusnya itu seperti pertanian turunmi itu pada saat musrembang, thun depan itu ada tractor yang mau saya adakan sesuai dengan perencanaanku cuma 5 (lima) unit mengusul maki artinya tidak mengharap cemasmi masyarakat, begitu namanya perencanaan ndik. Biasa itu SKPD tidak turun menjelaskan jadi masyarakat bingung apa mau nausulkan, akhirnya mengusulkan buta-buta masyarakat karna tidak ketemu apa yang direncanakan oleh SKPD”. (Wawancara dengan FS 05 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan pemerintah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) mempunyai semangat dalam diri mereka dapat kita lihat dari dengan menginterview seluruh anggotanya maupun dari perangkat daerah yang memberikan saran untuk hadir dalam proses musrembang yang



dilaksanakan oleh Kelurahan. Setiap SKPD diharuskan untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai perencanaan yang akan diambil sehingga masyarakat memahami dan dapat mengusulkan sesuai dengan apa yang akan direncanakan pihak SKPD.

Tabel. 4.3 Daftar Hadir Peserta Musrembang Kelurahan Sidenre Tahun 2018

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	2	3	4
1	Andi Basran S. Ap	Allu	Dinas pertanian
2	Haris GU, S. Pd	Bosalia	Tokoh adat Bosalia
3	Syamsuddin	Sidenre	Masyarakat
4	Armin Sujanto	Lembang loe	LSM Pattiro Jeka
5	Syp. Tuanlombo	Bosalia	Kep. Ling Bosalia
6	Kojang sita	Punagayya	Tokoh masyarakat
7	Arham	K. Mange Barat	Imam Lurah
8	B Dg Gassing	K. Mange Barat	Imam Lingkungan
9	H. Bachri Makkaraeng	K. Mange Barat	Tokoh masyarakat
10	Jinni	K. Mange Barat	Kader
11	Risna Wati	Sidenre	Kader
12	Kartini	K. Mange Barat	Kader
13	Syamsiah B	K. Mange Barat	Kader
14	Dr. Hj Rosliah L, MMKes	Jl. Anggrek 9	Ka. PKM Batas Kota
15	Syamsuddin	Sidenre	Staf Kelurahan

16	Sangkala M	Bosalia	Kader
17	M. Zain	Sidenre	Honoror
18	Syharuddin	Sidenre	Tokoh Masyarakat
19	Pasiri	K. Mange Barat	Tokoh Masyarakat
20	Nurdin	K. Mange Barat	Tokoh Masyarakat
21	A. Muh Idris M	K. Mange Barat	Masyarakat
22	Abd Jalil Sikki	Sidenre	Masyarakat
23	Burhan	Pakkaterang	Staf Camat Binamu
24	Amir	Sidenre	Masyarakat
25	Hilamed Jafar, SE	Sidenre	Staf Camat Binamu
26	Erninda Trisusanti, SE	Jl. Lingkar	Staf Camat Binamu
27	Kurniawaty S, SE	Lanto Dg Pasewang	Staf Camat Binamu
28	Asrul S	Pakkaterang	Staf Camat Binamu

#### 7. *Initiative* (prakarsa)

Inisiatif merupakan semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggung jawabnya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus perlu adanya tindakan-tindakan atau melakukan hal yang baru yang berbeda dengan sebelumnya. Dalam hal ini perlu adanya semangat dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baru dalam memperbesar tanggung jawabnya. Seperti hasil wawancara dengan ST selaku Kepala Kepala Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda yang mengatakan bahwa :

“Sedikit pencerahan dulu ndik, orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan yang tinggi pasti butuh perjuangan untuk bisa didapatkan ndik,

ditambah lagi dorongan dari orang tua, keluarga, kerabat, anak, serta istri jadi semangat itu ada untuk meraihnya. Ini yang saya sebutkan tadi ndik yang buat saya termotivasi dalam melakukan sesuatu. Keluarga itu salah satu penyemangat kita, karna ketika kita mempunyai masalah tempat kita curahkan itu adalah keluarga, Yakin ndik bakalan kau alami nantinya. Lanjut ndik mengenai motivasi, motivasi itu ada yang berasal dari dalam dan ada yang berasal dari luar, seperti saya katakan tadi ndik. Mengenai motivasi, saya sering memberikan motivasi kepada staf disini, bentuk motivasi yang saya berikan adalah sebuah arahan kepada staf ketika menghadapi masalah. Kita patut untuk memberikan dorongan atau semangat kepada anggota kita ketika kita melihat dia tertimpa masalah, mungkin karna arahan yang kita berikan itu adalah sebuah motivasi baginnya”. (Wawancara dengan MM 1 Juli 2019)

Selanjutnya tanggapan yang sama dengan informan AJ selaku masyarakat kelurahan sidenre, mengatakan bahwa :

“Kepala kelurahan selalu mengupayakan pembangunan ataupun program kerja yang akan dilakukan yang bersumber dari saran masyarakat”. (Wawancara dengan AJ 20 Juli 2019)

Hal ini senada dengan apa yang di ungkapkan dengan AS selaku LSM Pattiro Jeka yang mengatakan bahwa:

“Inisiatif bisa muncul kapan saja sesuai dengan keadaan, apakah kita menyelesaikan pekerjaan dengan adanya dorongan atau kita menyelesaikan pekerjaan dengan inisiatif kita sendiri, sama halnya disini ketika pemerintah mempunyai hambatan ataupun masalah dilapangan di harus berinisiatif untuk menyelesaikan hambatan tersebut bukan mlh masalah ini didiamkan”. (Wawancara dengan AS 25 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat saya simpulkan bahwa setiap menyelesaikan atau melaksanakan suatu pekerjaan selalu ada dorongan dari dalam maupun dari dorongan dari luar, sikap pemerintah disini harus mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan dikemudian hari. Selanjutnya ungkapan dari Kepala Kelurahan Sidenre mengatakan bahwa :

“Didalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah ada target pembangunan atau kegiatan akan rampung pada tahun sekian. Misal pembangunan jembatan targetnya pada tahun 2020 akan tetapi jembatan ini rampung pada 2021, ini yang harus menjadi perhatian apa penyebab dari masalah ini. Pemerintah harus berinisiatif untuk mengevaluasi penyebab melencengnya target yang telah ditentukan”. (Wawancara dengan RA 29 Juli 2019)

Selanjutnya tanggapan yang sama dari informan AH selaku staf kelurahan yang mengatakan bahwa:

“saya rasa semua pelaksanaan pembangunan yang dilakukan itu sudah ada pada koridornya masing-masing. Ketika ada pada masalah pada pembangunan pemerintah harus turub melihat penyebabnya apa”. (Wawancara dengan AH 29 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari informan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa ketika didalam pelaksanaan pembangunan terdapat hambatan mulai dari awal dilaksanakanya program sampai dengan selesainya pembangunan dilaksanakan pemerintah harus mengevaluasi apa penyebab dari permasalahan tersebut.

#### 8. *Personal qualities* (Kualitas pribadi)

Kualitas pribadi menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramahan dan integritas pribadi. Dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya sangat berpengaruh terhadap kualitas pribadi itu sendiri. Seperti ungkapan dari informan AS selaku LSM Pattiro Jeka mengatakan bahwa:

“Keberhasilan suatu organisasi tidak terlepas dari gaya kepemimpinan suatu pemimpin. Pembangunan yang berhasil pun tidak terlepas dari sikap kepemimpinan dan kepribadian tim pelaksana pembangunan”. (Wawancara dengan AS 25 Juli 2019)

Dari hasil wawancara informan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kepribadian yang dimiliki oleh seseorang dapat menentukan hasil yang akan

dikerjakan dan diperlukan sikap kepemimpinan yang kharismatik setiap pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya tanggapan yang sama pula dari informan AH selaku staf Kelurahan Sidenre yang mengatakan bahwa:

“Kami dari pihak kelurahan memang sewajibnya mengadakan musrembang dan melibatkan masyarakat dalam musrembang itu. Kami mengundang masyarakat kelurahan sidenre termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, SKPD terkait”. (Wawancara dengan AH 29 Juli 2019)

Hal ini tanggapan yang sama yang diungkapkan oleh Kepala Kelurahan Sidenre yang mengatakan bahwa :

“semua orang mempunyai kepribadian yang berbeda-beda, untuk melihat kepribadianya kita bisa lihat dari hasil yang mereka capai. Ketika ada sebuah pembangunan yang selesai sesuai target yang telah ditentukan itu telah mencerminkan bahwa dia sudah mempunyai sikap kepemimpinan yang baik karna dia dapat menyelesaikanya dengan tepat waktu”. (Wawancara dengan RA 29 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kepribadian seseorang dapat menentukan hasil yang dia capai, pembangunan yang berhasil tidak terlepas dari kepribadian tim pelaksana pembangunan.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah digambarkan pada bagian sebelumnya. Maka peneliti akan membahas data-data yang diperoleh di lokasi penelitian dan akan dipaparkan, dikaitkan dengan kajian kepustakaan atau referensi dalam penelitian ini. Berikut akan dipaparkan lebih jelas dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti:



### 1. *Quantity of work* (kuantitas kerja)

Berdasarkan kuantitas kerja yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) dapat dilihat dari banyaknya program kerja yang direalisasikan sesuai rencana program kerja Bappeda baik dari pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dalam merealisasikan suatu pembangunan, pemerintah melihat dari program kerja yang akan dianggarkan dan kesanggupan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto. Hal tersebut sesuai dengan dikemukakan oleh Wungu dan Brotoharsojo (2003) bahwa *Quantity* (kuantitas) adalah segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan jumlah hasil kerja dan dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat dipadankan dengan angka.

### 2. *Quality of work* (kualitas pekerjaan)

Berdasarkan kualitas pekerjaan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) dapat dilihat dari penjelasan salah satu informan yang mengatakan kualitas pembangunan belum cukup baik dapat dilihat dari pembangunan bendungan tanggul yang diselesaikan dua bulan yang lalu kini sudah retak. Kualitas pembangunan dapat kita lihat dari segi material yang digunakan, semakin baik material yang digunakan semakin berkualitas pula pembangun yang dilakukan. Seperti yang dikemukakan oleh Matutina (2001) kualitas kerja mengacu pada kualitas sumber daya manusia seperti pengetahuan, keterampilan, dan abilities.

Kemampuan yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang lebih berorientasi pada intelegensi dan daya pikir serta

penguasaan ilmu yang luas serta kemampuan dan penguasaan teknis operasional dibidang tertentu yang terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimilikinya yang mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerja sama, dan tanggung jawab.

### 3. *Job knowledge* (pengetahuan kerja)

Berdasarkan pengetahuan kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) dapat kita lihat dari salah satu informan yang mengatakan saya rasa semua pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sudah direncanakan dengan baik sesuai dengan pengetahuan yang dia miliki, semua rencana pembangunan yang akan dianggarkan oleh pemerintah sudah pastinya melalui tahap perencanaan sebelumnya.

Dari hasil diatas dapat dikatakan sudah tergambar jelas bahwa semua rencana kerja yang akan dilaksanakan sudah melalui tahap perencanaan yang melibatkan para tokoh politisi yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang baik. Seperti yang dikemukakan oleh Suriasumantri (2003) yang mengatakan bahwa pengetahuan kerja adalah segenap apa yang kita ketahui suatu objek tertentu atau hasil tahu setelah melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu.

### 4. *Creativeness* (kreativitas)

Berdasarkan kreativitas Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) dapat kita lihat dari salah satu informan yang mengatakan Didalam hal apapun kreativitas sangat diperlukan sebab menjadi kunci utama didalam sebuah masalah yang dihadapi. Olehnya itu pemerintah harus mempunyai gagasan-gagasan yang berkualitas sehingga dapat menimbulkan

hal-hal yang baru. Kreativitas sangat diperlukan didalam menyelesaikan suatu masalah. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam hal ini telah memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengeluarkan gagasan-gagasan yang sifatnya membangun.

Dari hasil diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah telah mengeluarkan gagasan-gagasan yang dimilikinya melalui pembangunan yang dilaksanakan. Seperti yang dikemukakan oleh Munandar (2009) kreativitas adalah kemampuan untuk mengkombinasikan, memecahkan, atau menjawab masalah, dan cerminan kemampuan operasional anak kreatif.

#### 5. *Cooperation* (kerja sama)

Berdasarkan kerja sama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) dapat kita lihat dari salah satu informan bentuk kerja sama pemerintah dengan masyarakat disini yaitu kami sebagai fasilitator pembangunan dengan melibatkan masyarakat dalam hal perencanaan program yang diusulkan, dan kami memberikan masyarakat untuk terlibat didalam pembangunan tersebut.

Dari hasil diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah melibatkan masyarakat dalam suatu pembangunan dan menjadikan masyarakat sebagai rekan kerja. Seperti yang dikemukakan oleh Tangkilisan (2005) dalam manajemen publik, memandang kerja sama perlu diadakan dengan kekuatan yang diperkirakan mungkin akan timbul. Kerja sama tersebut dapat didasarkan atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.

## 6. *Dependability* (keteguhan)

Berdasarkan Keteguhan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) dapat kita lihat dari salah satu informan yang mengatakan awal dilaksanakannya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ada yang mengawal pelaksanaan tersebut tetapi pengawalan yang dilakukan itu hanya sebentar saja. Dia datang untuk melihat pembangunan itu dilaksanakan dan beberapa menit sudah tidak ada lagi pengawas, dan hanya sampai disitu pengawasan yang dilakukan tanpa adanya evaluasi dari pemerintah.

Dari hasil diatas dapat dikatakan bahwa sifat keteguhan yang dimiliki oleh seseorang dan tertanam dalam diri sendiri akan membawa kita mengatasi pekerjaan dengan efisien mungkin. Dengan adanya sifat teguh kita akan fokus dalam menyelesaikan pekerjaan. Keteguhan merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh manusia dalam hidup, baik dalam spiritualitas maupun dalam keseluruhan aspek kehidupan manusia.

## 7. *Initiative* (prakarsa)

Berdasarkan prakarsa Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) dapat kita lihat dari salah satu informan yang mengatakan bahwa inisiatif bisa muncul kapan saja sesuai dengan keadaan, apakah kita menyelesaikan pekerjaan dengan adanya dorongan atau kita menyelesaikan pekerjaan dengan inisiatif kita sendiri, sama halnya disini ketika pemerintah mempunyai hambatan ataupun masalah dilapangan di harus berinisiatif untuk menyelesaikan hambatan tersebut bukan malah masalah ini didiamkan. Seperti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia prakarsa adalah

upaya, tindakan, mula-mula yang dimunculkan oleh seseorang, inisiatif, dan ikhtiar.

#### 8. *Personal qualities* (kualitas pribadi)

Berdasarkan Kualitas Pribadi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) dapat kita lihat dari salah satu informan yang mengatakan bahwa Keberhasilan suatu organisasi tidak terlepas dari gaya kepemimpinan suatu pemimpin. Pembangunan yang berhasil pun tidak terlepas dari sikap kepemimpinan dan kepribadian tim pelaksana pembangunan.

Dari hasil diatas dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu organisasi tidak terlepas dari sikap dari pimpinan, sehingga keberhasilan suatu daerah dapat dilihat bagaimana pemerintah mengatasi pembangunan yang ada di daerah Kabupaten Jeneponto. Kualitas pribadi merupakan ataukah sebaliknya, itu menjadi suatu ujian berat bagi pemerintah dalam memilah saran dari masyarakat, ataukah pemeritah mempunyai alasan tertentu.



## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan atau dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis merumuskan kesimpulan bahwa melihat kinerja Bappeda telah bekerja secara optimal dengan melibatkan dan menerima semua usulan program perencanaan dari masyarakat akan tetapi perlu adanya kesinambungan antara program kerja SKPD dengan apa yang menjadi program kerja di Tingkat Desa maupun Kelurahan.

*Quantity of work* (kuantitas kerja), Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jeneponto telah melaksanakan pembangunan sesuai dengan program kerja perangkat daerah dan kesanggupan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto.

*Quqlity of work* (kualitas pekerjaan), Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jeneponto telah bekerja cukup baik akan tetapi perlu adanya pembangunan yang berkualitas sehingga dapat dinikmati dengan periode yang lama.

*Job knowledge* (pengetahuan kerja), Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jeneponto mengenai pengetahuan kerja cukup baik karna dapat dilihat dari rencana pembangunan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Jeneponto.

*Creativeness* (kreativitas), Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jeneponto memberikan ruang kepada masyarakat Jeneponto untuk memberikan ruang kepada desa ataupun kelurahan untuk mengelola wilayahnya dengan inovasi-inovasi baru.

*Cooperation* (kerja sama), Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jeneponto cukup baik karena pemerintah melibatkan masyarakat dalam hal pembangunan dengan cara mengusulkan program melalui musrembang.

*Dependability* (keteguhan), Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jeneponto cukup baik karena dapat dilihat dari kesungguhan didalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang ada.

*Initiative* (prakarsa), Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jeneponto cukup baik karena mempunyai inisiatif terjun langsung kelapangan dalam menghadapi masalah dan mencari solusi permasalahan.

*Personal qualities* (kualitas pribadi), Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jeneponto cukup baik dalam hal kepemimpinan dan keramatahannya kepada masyarakat.

## **B. Saran**

Dengan memperhatikan kesimpulan diatas dan menganalisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis merasa perlu memberikan masukan sebagai berikut:

1. Pihak Bappeda agar kiranya bersikap tegas dalam mengorganisir usulan program dari masyarakat dan bersikap tegas terhadap SKPD, ketika ada SKPD yang tidak menghadiri undangan musrembang yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa maupun Kelurahan. Pihak Kelurahan harus bersikap dalam mengawal usulan program dari masyarakat hingga sampai ke Forum SKPD.
2. Pihak SKPD terkait dianjurkan untuk memberitahukan kepada masyarakat ketika diundang sebagai narasumber mengenai program kerjanya yang dianggarkan untuk tahun depan sehingga masyarakat memahami isi program tersebut.
3. Pihak Kelurahan harus bersikap dalam mengawal usulan program dari masyarakat hingga sampai ke Forum SKPD.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, Ary Ginanjar. 2016. *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spritual ESQ Emotional Spritual Quotient*. Jakarta: Arga Tilanta.
- As'ad, Mohammad. 2001. *Seri Ilmu SDM : Psikologi industry*. Yogyakarta: Liberty.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto. 2018. Jumlah Penduduk kabupaten jeneponto 2010-2020. Jeneponto: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto.
- Danim, Sudarwan. 2008. *Kinerja Staf dan Organisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Darmawan, D. H. 2013. *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi*. Surabaya: Pena Semesta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasibuan, Sayuti. 2008. *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: Alat Bagi Kebangkitan Bangsa*. Jakarta: UAI.
- Isbandi, Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: Fisip UI Press.
- Jayadinata. 2001. *Pendekatan Pengelolaan Sumberdaya; Masalah dan Konflik/Sengketa serta Pemecahan dan Pengelolanya*. Bandung: ITB.
- Jayadinata, Johara T and Pramandika I.G.P. 2006. *Pembangunan Desa dalam perencanaan*. Bandung: ITB.
- Kalangi, Roosje. 2015. *Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kinerja Aparat Sipil Negara di Kabupaten Kepulauan Sangehe Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol 2.
- Lusri, Lidia & Hotland Siagian. 2017. *Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Mediasi Pada Karyawan PT. Borwita Citra Prima Surabaya*. Jurnal agora. Vol 5 No 1.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: Refika Aditama.
- Matutina. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Moehariono. 2012. *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Depok: Rajagrafindo Persada.

- Munandar, Utami. 2009. *Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nugroho, Riant and Wrihatnolo, Randy R. 2011. *Manajemen Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Onibala Maya, dkk, 2017. Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Pelaksanaan Desa Di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 3, No 046 2017.
- Paselle, Enos. 2013. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif: Studi tentang Musrembang Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara*. *Jurnal Paradigma*. Vol 2. No 1.
- Rahmatia. 2016. *Kinerja pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Utara*. *Jurnal Katalogis*, Vol 2 No 4.
- Rosyida, Isma dan Fredian Tonny Nasdian. 2011. *Partispasi Masyarakat dan stakeholder dalam penyelenggaraan program corporate social responsibility (CSR) dan Dampakny Terhadap Komunitas Perdesaan*. Vol.5 No.01.
- Suriasumatri. 2003. *Filsafat Ilmu:Sebuah pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Siagian, S. P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia (edisi pertama)*. Jakarta: Binapura Aksari
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Slamet, M. 2003. *Membentuk Pola Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press.
- Suhandoyo.2000. *Pengembangan Wilayah Pendesaaan dan Kawasan Tertentu*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Sumarto. 2003. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Perpod.
- Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Wright, Lauren K. 2007. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: PT Indeks.